



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBENTUKAN ASET TETAP DAERAH YANG BERASAL
DARI BELANJA MODAL:
STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2000 – 2010**

TESIS

**SRI MINARNI
0706181151**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBENTUKAN ASET TETAP DAERAH YANG BERASAL
DARI BELANJA MODAL:
STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2000 – 2010**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)

**SRI MINARNI
0706181151**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.



Jakarta, Januari 2012



(Sri Minarni)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sri Minarni

NPM : 0706181151

Tanda Tangan : 

Tanggal : Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Sri Minarni
NPM : 0706181151
Program Studi : Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah
Judul Tesis : Pembentukan Aset Tetap Daerah yang berasal dari Belanja Modal: Studi pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2000 – 2010

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **B. Raksaka Mahi, SE., M.Sc , Ph.D** (.....)

Penguji : **Iman Rozani, SE., M.Soc., Sc** (.....)

Penguji : **Dr. Sonny Harry B. Harmadi** (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : Januari 2012

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan Kebijakan Publik Kekhususan Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Bapak B. Raksaka Mahi, SE., M.Sc., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2). Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3). Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (4). Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Januari 2012

(Sri Minarni)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Minarni
NPM : 0706181151
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Departemen : Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pembentukan Aset Tetap Daerah yang berasal dari Belanja Modal: Studi pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2000 – 2010

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2012
Yang menyatakan



(Sri Minarni)

ABSTRAK

Nama : Sri Minarni
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Judul : Pembentukan Aset Tetap Daerah dari Belanja Modal: Studi
Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran
2000 – 2010

Tesis ini membahas mengenai Aset Tetap (*Fixed Asset*) atau Modal Tetap (*Capital Stock*) dapat digunakan untuk melihat dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan dapat dilakukan analisis kontribusi dan distribusi terhadap data Aset Tetap atau Modal Tetap atas dasar harga konstan dan analisis trend data Aset Tetap atau Modal Tetap. Tujuan analisis kontribusi dan distribusi adalah untuk mengamati peranan masing-masing jenis Aset Tetap atau Modal Tetap terhadap total Aset Tetap atau Modal Tetap dan distribusi penggunaannya pada setiap sektor ekonomi yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini melihat bagaimana pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap di pemerintah daerah dengan mengambil sampel penelitian pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan mengkhhususkan pada pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal melalui metode *Direct Observation of Capital (DOC)*. Selain itu juga untuk memberikan bukti hubungan antara pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal sesuai klasifikasi Fungsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo dengan metode *Vector Auto Regression (VAR)*.

Kata-kata kunci : Modal Tetap, Aset Tetap, Belanja Modal, *Direct Observation of Capital (DOC)*, *Vector Auto Regression (VAR)*

ABSTRACT

Name : Sri Minarni
Study Program : Magister of Planing and Public Policy
Title : Capital Stock Formation – the effect of Capital Expenditure:
Studies in Gorontalo District for fiscal year 2000 – 2010

The focus of this study is about fixed assets or capital stock may be used to support for the economic growth of a region. In addition, the analysis can be performed on contribution and distribution of fixed assets or capital stock at constant prices and analysis of trend fixed assets or capital stock. Analysis of the contribution and distribution purposes is to examine the role of each type of fixed assets or capital stock of the total fixed assets or capital stock and the distribution of its use in every sector of the economy are viewed of Gross Regional Income (GDP). The research looked at how the formation of fixed assets or capital stock in local government by taking a sample of research in Gorontalo District to specialize in the formation of fixed assets or capital stock derived from the capital expenditure (capital spending/flow) using Direct Observation of Capital method (DOC method). In addition, to provide evidence of the correlation between the formation of fixed assets or capital stock from capital expenditure (capital spending/flow) in accordance with the classification function of Gross Regional Income (GDP) using Vector Auto Regression (VAR).

Keywords : *Capital Stock, Fixed Asset, Capital Spending /Flow /Expenditure, Direct Observation of Capital (DOC), Vector Auto Regression (VAR)*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah Penelitian	3
1.3. Ruang Lingkup / Batasan Masalah	3
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian	4
II. Landasan Teori.....	5
2.1. Aset Tetap (<i>Fixed Asset</i>) atau Modal Tetap (<i>Capital Stock</i>).....	7
2.2. Belanja Modal (<i>Capital Spending/ Flow/Expenditure</i>).....	10
2.3. Kaitan antara Aset Tetap dan Belanja Modal.....	15
2.4. Produk Domestik Bruto Regional (PDRB).....	16

III. Metode Penelitian	17
3.1. Sampel dan Sumber Data	17
3.2. Rumusan Permasalahan Penelitian.....	17
3.3. Kerangka Berpikir dan Model Penelitian	18
3.4. Analisis Data	19
IV. Pembahasan.....	32
4.1. Latar Belakang Perhitungan Aset Tetap Modal Tetap.....	32
4.2. Batasan pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap dalam penelitian ini.....	32
4.3. Proses Pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo	35
4.4. Pengaruh pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo	44
V. Kesimpulan dan Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Kerangka Berpikir Penelitian	19
Gambar 3.2. Alur <i>vouching</i> penambahan aset tetap	23
Gambar 3.3. Hasil <i>vouching</i> Validitas Pencatatan dan Ketepatan	24
Gambar 3.4. Alur <i>Perpetual Inventory Method</i> (PIM)	26
Gambar 4.1 Proporsi Aset Tetap atau Modal Tetap Pemerintah Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2010 menurut Klasifikasi Jenis Aset	36
Gambar 4.2. Persentase Kenaikan Aset Tetap atau Modal Tetap dengan tahun dasar 2001 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo	38
Gambar 4.3. Perbandingan Total Alokasi Belanja Modal per jenis dan Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal tersebut sampai dengan Tahun 2010	40
Gambar 4. 4. Perbandingan Realisasi Belanja Modal dan Pertambahan Aset Tetap dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2001 – 2010	41
Gambar 4.5. Tahapan pengklasifikasian realisasi APBD dengan teknik kesepadanan	47
Gambar 4. 6. Persentase Proporsi data Penambahan Aset Tetap (Capital Stock) yang berasal dari Belanja Modal (<i>Capital Spending</i>) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo menurut Klasifikasi FUNGSI Tahun 2000 – 2010	60
Gambar 4. 7. Perkembangan PDRB atas dasar Harga Konstan dan Akumulasi Aset Tetap (Capital Stock) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2001 -2010 (Rp milyar) ...	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Hasil Pengujian Validitas Metode PIM tahun 2001 – 2010 ...	43



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Data Akumulasi Aset Tetap Atau Modal Tetap Menurut Jenis Aset dengan Metode Langsung DOC (<i>Direct Observation Of Capital</i>) Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2001 – 2010 72
Lampiran 2	Data Akumulasi Aset Tetap Atau Modal Tetap Menurut Fungsi Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2001 – 2010 73
Lampiran 3	Hasil Pengujian Unit Root 74
Lampiran 4	Hasil Pengujian Kausalitas Granger 75
Lampiran 5	Hasil Pengujian Var Dengan Lag = 1 76
Lampiran 6	Hasil Pengujian Var Dengan Lag = 2 77

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terpenuhinya fasilitas publik yang berupa infrastruktur menjadikan masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Fasilitas publik tersebut dapat berupa Aset Berwujud (*Tangible Asset*) ataupun Aset Tidak Berwujud (*Intangible Asset*). Aset berwujud dapat berupa bangunan gedung, perumahan, jalan, peralatan dan mesin, dan sebagainya. Sedangkan aset tidak berwujud dapat berupa perangkat lunak komputer, hiburan, fasilitas seni dan sebagainya. Terkait dengan aset berwujud yang juga sering disebut sebagai Aset Tetap dalam istilah akuntansi dan Modal Tetap dalam istilah ekonomi adalah komponen yang penting dalam perhitungan aktiva dan kewajiban dalam rangka perhitungan rekening nasional (*National Accounts*). Hal ini karena Aset Tetap atau Modal Tetap merupakan indikator penting dalam aktivitas produksi dalam rangka menciptakan atau meningkatkan kekayaan nasional serta dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa selanjutnya di masa yang akan datang.

Aset Tetap atau Modal Tetap diantaranya juga dapat digunakan untuk:

1. Memperoleh gambaran mengenai produk netto (surplus usaha, nilai tambah netto) dari suatu proses produksi. Produk netto ini dicari dengan mengurangi nilai produksi (bruto) dengan penyusutan modal (*Capital Depreciation*). Dan disinilah pentingnya untuk memiliki data mengenai Aset Tetap atau Modal Tetap. Dengan mengetahui Aset Tetap atau Modal Tetap tentunya dapat memperkirakan berapa besar penyusutan yang akan terjadi.

2. Memberikan gambaran mengenai besarnya kekayaan yang diperoleh dari suatu proses pembangunan ekonomi pada suatu periode tertentu.
3. Mengetahui *economic efficiency* dan *economic productivity* dari Aset Tetap atau Modal Tetap yang digunakan. *Efficiency* bermakna kehematan dalam penggunaan Aset Tetap atau Modal Tetap untuk memberikan nilai tambah, tentunya semakain besar perbandingan antara nilai tambah dengan penggunaan Aset Tetap atau Modal Tetap akan lebih baik. kemudian untuk *productivity* diartikan sejauhmana menggunakan Aset Tetap atau Modal Tetap untuk menciptakan sejumlah output.

Selain itu Aset Tetap atau Modal Tetap juga dapat digunakan untuk melihat dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan dapat dilakukan analisis kontribusi dan distribusi terhadap data Aset Tetap atau Modal Tetap atas dasar harga konstan dan analisis trend data Aset Tetap atau Modal Tetap. Tujuan analisis kontribusi dan distribusi adalah untuk mengamati peranan masing-masing jenis Aset Tetap atau Modal Tetap terhadap total Aset Tetap atau Modal Tetap dan distribusi penggunaannya pada setiap sektor ekonomi yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di sisi lain, Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi untuk pembelian/penambahan barang modal atau Aset Tetap atau Modal Tetap. Umumnya Aset Tetap atau Modal Tetap dinilai dengan uang, yaitu jumlah Aset Tetap atau Modal Tetap dikalikan harga perolehan per unit Aset Tetap atau Modal Tetap tersebut. Dengan demikian barang modal atau Aset Tetap atau Modal Tetap merupakan konsep stok (*stock concept*), karena besarnya dihitung pada satu periode tertentu. Investasi sebagaimana dimaksud di atas, pada pemerintah daerah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada akun Belanja Modal.

Berkenaan dengan pemikiran tersebut maka terbentuknya Aset Tetap atau Modal Tetap menjadi komponen penting. Oleh sebab itu penelitian ini akan melihat bagaimana pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap di pemerintah daerah dengan mengambil sampel penelitian pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan menghususkan pada pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal.

2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan hal di atas penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan mengenai:

1. Pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
2. Pengaruh pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Gorontalo.

3. Ruang Lingkup / Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data antara tahun anggaran 2000 – 2010. Pemerintah Kabupaten Gorontalo dipilih sebagai obyek penelitian karena kerjasama yang baik, kemudahan dan akses data yang dapat digunakan untuk penelitian. Tahun anggaran 2000 – 2010 dipilih karena tahun anggaran tersebut merupakan tahun dimulainya penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian mengenai pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membuktikan pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo serta menguji validitasnya pembentukan/perhitungannya.
2. Membuktikan pengaruh pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (pertumbuhan PDRB) Kabupaten Gorontalo.

5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan tentang penganggaran Belanja Modal yang akan terkait dengan pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap.
2. Memberikan bukti ada tidaknya pengaruh pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bukti pendukung bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan penganggaran Belanja Modal maupun Aset Tetap atau Modal Tetap.
3. Menambah tinjauan pustaka bagi permasalahan serupa serta dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain yang akan lebih mendalami lagi penelitian dengan basis permasalahan yang serupa.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Permasalahan terkait dengan Belanja Modal dan Aset Tetap atau Modal Tetap merupakan permasalahan yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh beberapa peneliti. Di Indonesia, penelitian mengenai Modal Tetap dilakukan dengan menghubungkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya pada tahun 1967 – 1981, dinyatakan bahwa peningkatan Belanja Modal memberi dampak 23,5% pertumbuhan ekonomi (Sundrum:1986). Atas dasar hal ini maka dapat dinyatakan bahwa peningkatan Belanja Modal memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dampak ini akan terjadi jika Belanja Modal tersebut menjadi suatu Modal Tetap yang dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat. Dengan mengacu pada penelitian ini, jika peningkatan Belanja Modal ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah maka peningkatan PDRB tentu akan seiring dengan peningkatan Belanja Modal yang menjadi Modal Tetap.

Kemudian penelitian mengenai pembentukan Modal Tetap di Indonesia (*Capital Formation and Capital Stock in Indonesia*) oleh Pierre van der Eng (Van der Eng:2008), penelitian mengenai pengukuran Modal Tetap yang dihubungkan dengan rekening nasional dan *Gross Domestic Bruto* (GDP) dengan judul *Measuring Capital Stock in Germany*. Dalam penelitiannya mengenai pembentukan Aset Tetap di Indonesia pada tahun 1950 – 2007 dengan metode *Perpetual Inventory Method* ditemukan bahwa kenaikan Aset Tetap atau Modal Tetap bertumbuh sekitar 10% per tahun sejak tahun 1960 hingga masa krisis pada tahun 1997-1998. Selain itu, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dari total estimasi pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap tersebut mempengaruhi *Gross Domestic Bruto* (GDP) sekitar 7,6% yang dapat dibagi dalam lima kategori yaitu Peralatan dan Mesin memberikan pengaruh 3%, Jalan, Irigasi, dan Jembatan memberikan pengaruh 0,5%, Aset Tetap selain Perumahan memberikan pengaruh 2,2%, Aset Tetap Perumahan 1,5%, dan Aset Tetap lainnya 0,4%. (Schmalwasser and Schidlowski:2006).

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap dapat terbagi dalam beberapa kategori sehingga dapat dilihat kategori yang sangat potensial mempengaruhi GDP. Jika pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal seperti penelitian Sundrum kemudian dibagi ke dalam fungsi ataupun sektor seperti penelitian Van der Eng pada pemerintah daerah maka pemerintah daerah dapat melihat kategori fungsi atau sektor yang menjadi pendukung peningkatan PDRB pada wilayahnya. Dasar ini yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian mengenai Modal Tetap dan perhitungannya juga pernah dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini melengkapi penelitian mengenai Modal Tetap di Indonesia. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa berdasarkan harga konstan 1993, terjadi penurunan angka investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB). Secara komposisi, dibandingkan periode 10 tahun sebelumnya 1983-1992 telah terjadi perubahan dalam komposisi PMTB. Pada periode 1983-2002, sektor pemerintahan umum memegang porsi terbesar (28%) disusul oleh sektor keuangan persewaan dan jasa-jasa (26%) dan sektor industri pengolahan (16%). Selama kurun waktu 1960 sampai dengan 2002, secara rata-rata stok kapital terbesar terjadi pada jenis barang modal bangunan (kontribusi 71,1%) disusul jenis barang modal mesin (kontribusi 15,8%).

Penelitian ini juga menemukan bahwa distribusi stok kapital menurut sektor ekonomi, investasi barang modal sejak tahun 1980-an tidak terdistribusi secara merata di seluruh sektor ekonomi. Distribusi stok kapital terkonsentrasi hanya pada 2 sektor ekonomi, yaitu sektor pemerintahan umum dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Persentase rata-rata (periode 1980- 2002) distribusi barang modal pada kedua sektor tersebut masing-masing sebesar 38,1% dan 19,5%. Distribusi stok kapital pada sektor pemerintahan umum terutama berasal dari investasi pada pembangunan infrastruktur, yang terdiri dari bangunan, jalan dan sarana penunjang lainnya. (Wicaksono et all: 2002).

Penelitian dari Wicaksono et all memberikan arti penting dalam pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap di pemerintah daerah. Distribusi Stok Kapital atau Aset

Tetap di pemerintah daerah yang terkategori ke dalam fungsi-fungsi atau sektor-sektor ekonomi akan memberikan data penting dalam melakukan analisis ekonomi. Analisis tersebut diantaranya adalah mengetahui pengaruh pembentukan Aset Tetap dari Investasi atau Belanja Modal per fungsi atau sektor ekonomi terhadap PDRB pemerintah daerah tersebut.

Atas hasil penelitian-penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini akan terkait dengan Aset Tetap Daerah, Belanja Modal dan PDRB. Untuk itu pengertian dan batasan mengenai hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aset Tetap (*Fixed Asset*) atau Modal Tetap (*Capital Stock*)

Penelitian ini akan membuktikan adanya pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Aset Tetap atau Modal Tetap secara umum merupakan persediaan berbagai jenis barang modal, seperti bangunan, peralatan dan mesin, alat transportasi, ternak, dan barang modal lainnya, yang memberikan kontribusi terhadap kelangsungan suatu proses produksi. Seringkali dalam prakteknya, data Aset Tetap atau Modal Tetap tersebut menggambarkan posisi barang modal yang terbentuk dari suatu proses akumulasi investasi dalam jangka waktu tertentu.

Aset Tetap merupakan suatu investasi yang dikenal sebagai *Gross Fixed Capital Formation* atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB adalah suatu proses pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal (*capital goods*) yang di dalam lingkup pemerintahan digunakan untuk keperluan pemenuhan fasilitas publik. Yang dapat digolongkan dalam konsep ini adalah peralatan yang akan digunakan dalam proses produksi/pelayanan secara terus menerus (*repeatedly*) dan berkesinambungan (*continuously*) yang disebut sebagai Aset Tetap atau Modal Tetap.

Aset Tetap atau Modal Tetap yang mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun akan mengalami penyusutan baik secara teknis (usia pakai) maupun ekonomi (nilai). Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan proses penambahan atau pengurangan Aset Tetap atau Modal Tetap pada suatu periode tertentu. Istilah bruto (*gross*)

mengindikasikan bahwa didalamnya masih termasuk unsur penyusutan. Penyusutan ini menggambarkan besaran ausnya nilai Aset Tetap atau Modal Tetap sebagai akibat dari suatu proses produksi/pelayanan. Bruto (*gross*) dan bersih (*net*) didasarkan pada konsep perbedaan nilai dimana bruto (*gross*) merujuk pada Kekayaan (*wealth*) dan bersih (*net*) merujuk pada Modal Tetap Produktif (*productive capital stock*). (Wicaksono et all: 2002)

Aset Tetap (*Stock of Fixed Asset*) termasuk Aset Berwujud (*Tangible Asset*) ataupun Aset Tidak Berwujud (*Intangible Asset*). Aset berwujud dapat berupa bangunan gedung, perumahan, jalan, peralatan dan mesin, dan sebagainya. Sedangkan aset tidak berwujud dapat berupa perangkat lunak komputer, hiburan, fasilitas seni dan sebagainya (Schmalwasser and Schidlowski:2006).

Dalam kaitannya dengan pembentukan modal tetap, yang dimaksud dengan Aset Tetap (*Stock of Fixed Asset*) dalam penelitian ini mengacu pada Aset Tetap atau Modal Tetap yang berwujud (fisik). Aset Tetap atau Modal Tetap tersebut dapat diklasifikasikan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan pengklasifikasian ini yang akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menggolong-golongkan Aset Tetap atau Modal Tetap yang dimilikinya. Oleh sebab itu pengklasifikasian ini menjadi penting karena akan terkait dengan data penelitian yang terdapat pada pemerintah daerah.

Pengklasifikasian Aset Tetap atau Modal Tetap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Aset Tetap atau Modal Tetap menurut jenisnya

Klasifikasi ini membagi Aset Tetap atau Modal Tetap ke dalam jenis tanah (yang digunakan untuk proses produksi/pelayanan); peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Pembagian jenis aset tetap dalam klasifikasi ini sesuai dengan pembagian dalam prinsip-prinsip akuntansi.

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap atau Modal Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional/pelayanan publik dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai untuk kegiatan operasional/pelayanan publik.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional/pelayanan publik dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah untuk pelayanan publik dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas seperti ternak, bibit tanaman, dan alat musik; yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional/pelayanan publik/proses produksi dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum dilakukan penyerahan kepada pemerintah daerah dan pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya namun sebagian atau seluruh bangunan tersebut telah dapat dimanfaatkan untuk operasional/pelayanan publik.

Klasifikasi tersebut merupakan klasifikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengklasifikasian Aset Tetap atau Modal Tetap yang dimilikinya yang tersaji dalam Laporan Keuangan. Dengan demikian, data Aset Tetap yang akan dilakukan penelitian akan dimulai dari pengklasifikasian ini.

2. Klasifikasi Aset Tetap atau Modal Tetap menurut fungsi.

Klasifikasi ini membagi Aset Tetap atau Modal Tetap sesuai dengan pengklasifikasian tujuan dari Belanja Modal (*Capital Expenditure*). Fungsi yang dimaksud adalah fungsi pelayanan umum; pertahanan; ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; agama; pendidikan; dan perlindungan sosial. Lebih lanjut mengenai hal ini akan diuraikan dalam klasifikasi Belanja Modal (*Capital Expenditure*).

Pengklasifikasian ini tidak digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyajian Laporan Keuangan. Namun demikian klasifikasi ini akan lebih baik dalam menjelaskan tujuan dari suatu investasi (Belanja Modal) sehingga analisis- analisis per sektor ekonomi dapat dilakukan. Analisis tersebut diantaranya adalah untuk melihat pengaruh pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal per fungsi atau sektor ekonomi terhadap PDRB.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini klasifikasi Aset Tetap yang telah disajikan dalam pengklasifikasian sesuai Laporan Keuangan akan diklasifikasikan kembali menurut fungsi. Mekanisme pengklasifikasian kembali ini diharapkan juga akan memberikan alternatif metode dalam penelitian-penelitian lain yang sejenis.

2. Belanja Modal (*Capital Spending/Flow/Expenditure*)

Penelitian ini memfokuskan pada pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal. Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi untuk pembelian/penambahan barang modal atau Aset Tetap atau Modal Tetap. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Investasi sebagaimana dimaksud di atas terangkum dalam anggaran pada akun Belanja Modal.

Dengan demikian Belanja Modal dapat merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk pelaksanaan proses pengadaan, pembuatan dan pembelian

barang modal (*capital goods*) yang di dalam lingkup pemerintahan digunakan untuk keperluan pemenuhan fasilitas publik. Atau dapat dikatakan bahwa Belanja Modal adalah belanja yang mempunyai tujuan untuk menambahkan Aset Tetap atau Modal Tetap bagi suatu pemerintah daerah pada saat tertentu untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Jadi dalam penelitian ini akan berfokus pada Belanja Modal yang menjadi faktor pembentuk Aset Tetap atau Modal Tetap yang pada gilirannya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga memperbaiki tingkat ekonomi pemerintah daerah tersebut.

Belanja Modal juga dikategorikan dalam beberapa kategori diantaranya adalah:

1. Kategori Belanja Modal sesuai jenis

Belanja Modal sesuai jenis adalah kategori yang paling sering digunakan dalam mengklasifikasikan Belanja Modal dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Data pengklasifikasian Belanja Modal pada pemerintah daerah juga diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ini. Oleh sebab itu penelitian ini akan memulai dari data Belanja Modal dengan klasifikasi ini. Kategori Kategori Belanja Modal terbagai dalam jenis-jenis belanja berikut ini:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor

yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2. Kategori Belanja Modal sesuai fungsi

Kategori Belanja Modal ini didasarkan pada konsep yang dibuat oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD – *Organization for Economic Co-operation and Development*) dan

dipublikasikan oleh Divisi Statistik PBB mengembangkan klasifikasi fungsi-fungsi pemerintah. Fungsi-fungsi yang dinamakan *The classification of functions of government* (COFOG) merupakan klasifikasi detail dari fungsi-fungsi atau tujuan sosio-ekonomi, yang ditargetkan bisa dipenuhi oleh unit pemerintah melalui berbagai macam pengeluaran. (IMF:2001).

COFOG menyediakan klasifikasi menyangkut pengeluaran oleh pemerintah untuk fungsi-fungsi yang menunjukkan bahwa hal itu merupakan kepentingan umum dan diterima pada beragam aplikasi analisis statistik untuk kesehatan, pendidikan, pengamanan sosial dan pengamanan lingkungan sebagai contoh dapat digunakan untuk mempelajari efektifitas program-program pemerintah dalam area tersebut. Klasifikasi Belanja Modal dalam kategori ini akan memberikan informasi mengenai tujuan dari dikeluarkannya suatu Belanja Modal yang dijabarkan dalam pembagian fungsi. Fungsi-fungsi yang dimaksud dalam konsep tersebut lebih dikenal dengan fungsi sesuai *Government Finance Statistics/GFS* (IMF:2001).

Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pelayanan umum; pertahanan; ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; agama; pendidikan; dan perlindungan sosial. Klasifikasi sesuai dengan fungsi ini akan berguna dalam menentukan pembentukan Aset Tetap sesuai klasifikasi fungsi atau sektor ekonomi sehingga dapat dilakukan analisis pengaruhnya terhadap PDRB.

3. Kategori Belanja Modal sesuai organisasi

Belanja Modal dalam kategori ini diklasifikasikan sesuai dengan pelaku/subyek pengeluaran dari Belanja Modal itu sendiri. Di dalam proses produksi/pelayanan yang terjadi di pemerintah daerah, pemerintah daerah melaksanakan mandatnya dengan bantuan organisasi-organisasi teknis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi

tersebut yang merupakan unit penanggung jawab dari setiap kegiatan produksi/pelayanan kepada publik. Kategori ini terbagi sesuai dengan organisasi-organisasi teknis yang terbentuk dalam suatu pemerintah daerah.

Klasifikasi ini akan digunakan sebagai jembatan untuk melakukan pengklasifikasian kembali data Aset Tetap maupun Belanja Modal dari Klasifikasi Ekonomi ke Klasifikasi Fungsi jika data-data sesuai klasifikasi yang akan digunakan untuk penelitian tidak tersedia.

4. Kategori Belanja Modal sesuai sektor

Kategori Belanja Modal sesuai sektor adalah kategori pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan pada sektor-sektor pemerintah yang diwujudkan dalam pengadaan, pembuatan dan pembelian Aset Tetap atau Modal Tetap untuk tujuan pelayanan kepada masyarakat. Sektor-sektor pemerintahan tersebut adalah Sektor Belanja Pembangunan; Sektor Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan; Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi & Media Massa; Sektor Keamanan Dan Ketertiban Umum; Sektor Hukum; Sektor Transportasi; Sektor Tenaga Kerja; Sektor Pertanian Dan Kehutanan; Sektor Pertambangan Dan Energi; Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah Dan Koperasi; Sektor Industri.

Klasifikasi ini juga digunakan sebagai jembatan untuk melakukan pengklasifikasian kembali data Aset Tetap ataupun Belanja Modal ke dalam klasifikasi yang diperlukan untuk penelitian. Klasifikasi ini biasanya disajikan untuk data laporan sebelum era otonomi daerah. Pengeluaran berupa Belanja Modal pada era ini tersaji dalam pengeluaran pembangunan yang terbagi dalam sektor-sektor tersebut di atas.

3. **Kaitan antara Aset Tetap atau Modal Tetap dan Belanja Modal**

Sesuai dengan tujuan penelitian serta gambaran mengenai Aset Tetap atau Modal Tetap dengan Belanja Modal, maka penulis akan mengkaitkan keduanya dalam penelitian ini. Sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa konsep mengenai Aset Tetap atau Modal Tetap dapat dilihat dari dua sisi yaitu konsep arus (*flows*) dan konsep saldo/stok (*stock*). Arus menunjukkan “perubahan” (pertambahan atau pengurangan), sedangkan “stok” lebih menunjukkan posisi (nilai pada saat tertentu). Dalam terminologi lain, adanya proses perubahan tersebut dikenal sebagai suatu proses akumulasi. Dengan demikian, data Aset Tetap atau Modal Tetap menggambarkan posisi barang modal yang terbentuk dari suatu proses akumulasi dalam jangka waktu tertentu (umumnya relatif panjang). Kedua konsep ‘arus’ dan ‘stok’ tersebut masing-masing memiliki makna yang berbeda namun saling mendukung sesuai dengan prinsip pencatatan transaksinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat dari sebuah *flows* adalah *stocks*. Akibat dari suatu realisasi Belanja Modal (*Capital Flow*) adalah Modal Tetap sebagai konsekuensi logis. Hal ini juga menegaskan bahwa sebuah *flows* akan memberikan dampak yang lebih dekat terhadap pelayanan publik dalam kaitannya dengan pembangunan ketika *flows* tersebut telah berbentuk suatu *stocks*. Dengan kata lain, suatu Belanja Modal (*Capital Stock*) akan bermanfaat lebih langsung bagi kepentingan publik ketika Belanja Modal (*Capital Flow*) tersebut telah berubah menjadi Aset Tetap atau Modal Tetap karena manfaatnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.

4. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik tertentu dalam satu tahun. PDRB juga dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit

ekonomi di suatu wilayah. PDRB dihitung dengan dua dasar yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian ini PDRB akan merupakan ukuran yang akan digunakan untuk menilai pengaruh dari pembentukan Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal yang telah terklasifikasi ke dalam fungsi. PDRB yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan PDRB secara total dari PDRB Kabupaten Gorontalo.

BAB 3 METODE PENELITIAN

1. Sampel dan Sumber Data

Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sumber data diperoleh dari:

1. APBD Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
2. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
3. Buku Kabupaten Gorontalo dalam Angka;
4. Laporan Kebijakan Umum APBD;
5. Data APBD dan Neraca Pemerintah Daerah dari Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP;

2. Rumusan Permasalahan Penelitian

Terbentuknya Aset Tetap atau Modal Tetap menjadi komponen penting dalam melihat dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah serta kontribusi dan distribusinya pada suatu sektor/fungsi/lapangan usaha yang berguna bagi suatu informasi dukungan dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, Aset Tetap atau Modal Tetap merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat atau merupakan fasilitas publik. Dengan demikian pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal (*Capital Flow*) akan memberikan informasi kekayaan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pelayanan/fasilitas publik yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dapat terpenuhi. Atas permasalahan ini dapat dinyatakan bahwa:

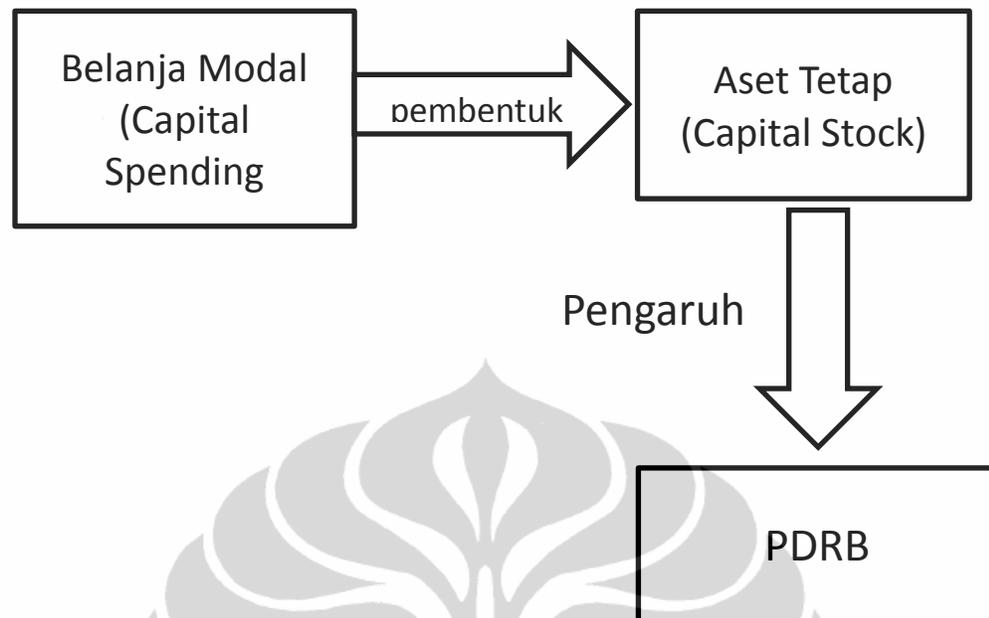
H1 : Proses Pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap dalam pernyataan permasalahan pertama ditujukan untuk dapat melakukan analisis kontribusi dan distribusi Aset Tetap atau Modal Tetap. Hal ini dilakukan untuk mengamati peranan masing-masing jenis Aset Tetap atau Modal Tetap terhadap total Aset Tetap atau Modal Tetap dan distribusi penggunaannya pada setiap sektor ekonomi yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga dapat memberikan bukti bahwa pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap mendukung pembangunan ekonomi yang terlihat dari pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh sebab itu, pernyataan permasalahan atas hal ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo

3. Kerangka Berpikir Penelitian

Pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi. Terbatasnya informasi mengenai pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap pada pemerintah daerah membuat kerangka berpikir dalam penelitian ini disesuaikan dengan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan kemudian dielaborasi dengan kondisi serta karakteristik data yang dijadikan penelitian. Penelitian ini mendasarkan bahwa pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang disajikan pada Neraca merupakan pencerminan dari alokasi anggaran Belanja Modal dalam APBD. Sehingga dapat digambarkan dalam suatu kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 3.1. : Kerangka Berpikir Penelitian

4. Analisis Data

Berdasarkan hipotesis serta kerangka berpikir di atas, dalam penelitian ini analisis datanya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Proses Pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal merupakan suatu proses yang dapat dilakukan dengan beberapa metode terkait dengan metode penghitungan pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap. Metode penghitungan Aset Tetap atau Modal Tetap yang saat ini dikenal terdapat dua pendekatan yaitu metode langsung dan metode tak langsung.

Dengan menggunakan metode langsung, data Aset Tetap atau Modal Tetap disusun atas dasar data yang dikumpulkan secara langsung dari laporan keuangan perusahaan ataupun administrasi pemerintahan, sedangkan metode tak langsung lebih memfokuskan

pada penggalian data sekunder yang tersedia dan penetapan asumsi-asumsi yang digunakan.

Terdapat tiga metode penghitungan dalam metode langsung, yaitu:

- a. *Fixed Asset Accounting Simulation Model* (FAASM),
- b. *Direct Observation of Capital* (DOC), dan
- c. *Anchored* FAASM.

(Wicaksono et all : 2002)

Dari ketiga metode tersebut, metode FAASM merupakan metode langsung yang paling menyeluruh (*integrated direct method*) karena mampu menghasilkan data statistik Aset Tetap atau Modal Tetap dengan kategori dan dimensi yang paling luas. Menggunakan metode ini berarti bahwa data umur aset (*asset life*) dan pola distribusi (*discard pattern*) bukan diasumsikan sebagaimana penghitungan dengan metode tidak langsung, melainkan ditentukan dari keadaan yang sesungguhnya melalui pengamatan secara langsung.

Metode DOC dilakukan melalui survei, dimana data Aset Tetap atau Modal Tetap dikumpulkan atas dasar *historical cost*. Oleh sebab itu, akurasi DOC sangat tergantung pada kualitas prosedur akuntansi pemerintahan. Sementara itu, metode Anchored FAASM merupakan kombinasi antara metode FAASM dan DOC dimana data yang dikumpulkan melalui survei digunakan untuk memperbaiki data hasil penghitungan menggunakan metode FAASM. Metode DOC merupakan metode langsung yang lebih banyak digunakan dibandingkan metode langsung lainnya.

Keunggulan yang dimiliki metode DOC, yaitu tingkat akurasi data investasi serta *asset life* dan *discard pattern* setiap jenis aset yang dapat diketahui secara langsung. Adanya upaya untuk mendapatkan data Aset Tetap atau Modal Tetap yang lebih *reliable* menyebabkan metode pengukuran DOC disarankan untuk digunakan menggantikan

metode tak langsung. Namun demikian, implementasi metode DOC seringkali terhambat karena membutuhkan biaya yang sangat besar dan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi *skill* maupun jumlahnya (Wicaksono et al: 2002).

Sedangkan metode tak langsung biasanya digunakan oleh negara-negara yang karena berbagai alasan tidak dapat melaksanakan survei secara langsung ke pemerintah daerah atau perusahaan. Metode tak langsung yang banyak digunakan adalah *Perpetual Inventory Method* (PIM). Metode PIM yaitu penghitungan Aset Tetap atau Modal Tetap yang dilakukan dengan cara memanfaatkan data sekunder yang tersedia, seperti data Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB (*Gross Fixed Capital Formation/GFCF*).

Dua syarat mutlak agar metode PIM menghasilkan angka yang *reliable* adalah tersedianya data PMTB yang dapat dipercaya dengan kategori yang rinci dan cakupan data yang luas serta penetapan asumsi yang digunakan.

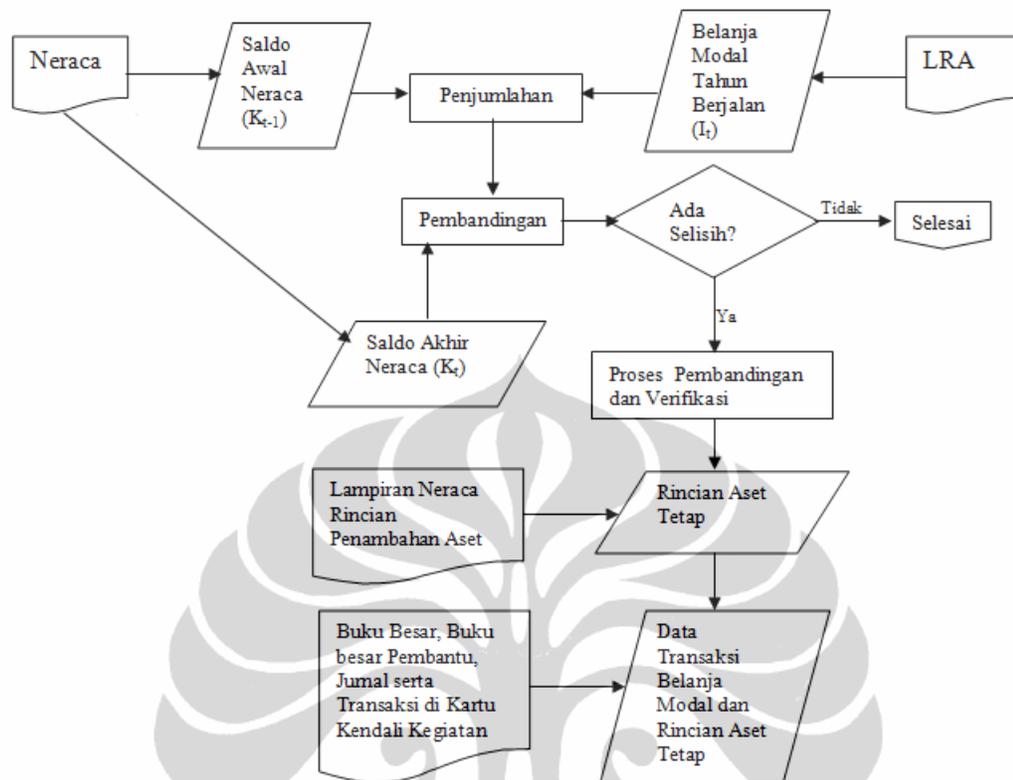
Atas dasar metode-metode penghitungan Aset Tetap atau Modal Tetap seperti dijelaskan di atas, dalam penelitian ini pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal disusun dengan metode langsung DOC. Sehingga data Aset Tetap atau Modal Tetap disusun atas dasar data yang dikumpulkan secara langsung dari laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dimaksud disini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Neraca digunakan untuk meneliti Aset Tetap atau Modal Tetap yang telah dibentuk dan dilaporkan pada saat tertentu, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk melihat Belanja Modal sebagai faktor pembentuk Aset Tetap atau Modal Tetap.

Penelitian mengenai pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap ini juga dilakukan pengujian dengan teknik *vouching* untuk dapat meyakini kualitas prosedur akuntansi pemerintahan yang merupakan

syarat penggunaan metode DOC sehingga metode DOC dapat memberikan akurasi yang tepat. Salah satu cara untuk meyakini kualitas prosedur akuntansi pemerintahan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah dengan menguji ketepatan pencatatannya hingga ke dokumen-dokumen sumbernya. Hal ini disebabkan pencatatan yang tepat akan memberikan keyakinan akan suatu informasi yang disajikan dapat dipercayai.

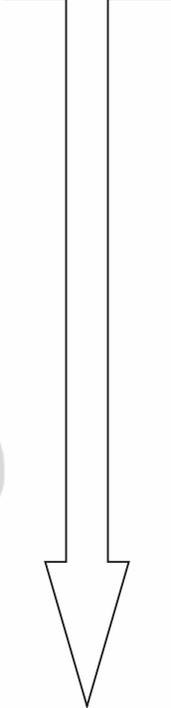
Untuk dapat memenuhi tujuan itu maka alat analisis yang digunakan adalah dengan teknik audit yaitu teknik *vouching*. Maka teknik *vouching* dipilih untuk dapat melakukan analisis data ini. *Vouching* (Pemeriksaan Bukti Pendukung) adalah menelusuri suatu informasi/data dalam suatu dokumen ke pencatatan pendukungnya menuju kepada adanya bukti pendukungnya (*vouchernya*); atau menelusur mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan atau pemeriksaan dokumen yang mendukung suatu transaksi atau jumlah yang telah tercatat.

Karena tujuan teknik *vouching* adalah untuk memperoleh bukti mengenai item yang tercatat dalam catatan akuntansi, maka arah pencarian dokumen pendukung tersebut bersifat krusial. Untuk melakukan *vouching*, arah pengujian adalah dari item yang tercatat hingga dokumentasi pendukung. Alurnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3.2. : Alur *vouching* penambahan aset tetap

Jika dari metode seperti pada gambar 3.2 telah dilakukan dan data antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca terdapat perbedaan maka akan dilakukan verifikasi lebih lanjut ke dokumen-dokumen pencatatan lainnya seperti Lampiran Neraca Rincian Penambahan Aset, Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Jurnal serta Kartu Kendali Kegiatan dan dapat disederhanakan dalam bagan berikut ini :

Tujuan Pembuktian	Validitas Pencatatan dan Ketepatan Pengklasifikasian		Arah teknik Vouching 
Laporan Yang diambil	LRA tahun 2001 – 2010	Neraca tahun 2001 – 2010 dan Laporan Penghapusan Aset Tetapnya	
Unsur laporan yang dibuktikan	Realisasi Belanja Modal	Penambahan Aset Tetap	
Teknik Pembuktian	Pembandingan (membandingkan data/informasi dalam satu laporan dengan laporan yang lain) dan Verifikasi (pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi dari suatu dokumen) Data Realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan data Penambahan Aset Tetap kemudian dibandingkan dan diverifikasi dengan dokumen pendukung lainnya		
Validitas Pencatatan dan Ketepatan Pengklasifikasian	Apakah data Realisasi Belanja Modal sejalan dengan Penambahan Aset Tetap?		
	Dapat terdapat perbedaan :		
	Lebih besar	Lebih besar	
	Lebih kecil	Lebih kecil	
	Penjelasan dan penelusuran perbedaan		
Simpulan Pembuktian	Realisasi belanja modal valid dan tepat dicatat sebagai penambah aset tetap. Namun juga terdapat beberapa perbedaan.		

Gambar 3.3. : Hasil *vouching* Validitas Pencatatan dan Ketepatan

Kemudian untuk menguji validitas dari penghitungan pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal digunakan Metode Inventarisasi Perpetual atau *Perpetual Inventory Method* (PIM). Pengujian validitas penghitungan pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap dari Belanja Modal dengan metode PIM dapat dirumuskan sebagai berikut:

<i>Gross stock at start of year</i>	+
<i>Additions to fixed assets</i>	-
<i>Retirements of fixed assets</i>	=
<i>Gross stock at end of year (= gross stock at start of the following year)</i>	

(Schmalwasser and Schidlowski:2006)

Yang dapat dijabarkan dalam persamaan akuntansi yang diterima umum sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tetap	+
Realisasi Belanja Modal yang menjadi Aset Tetap	-
Penghapusan Aset Tetap	=
Saldo Akhir Aset Tetap(= Saldo Awal Aset Tetap Tahun berikutnya)	

Metode tersebut yang jika dibuat menjadi suatu persamaan dalam analisis ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$K_t = K_{t-1} + I_t - R_t$$

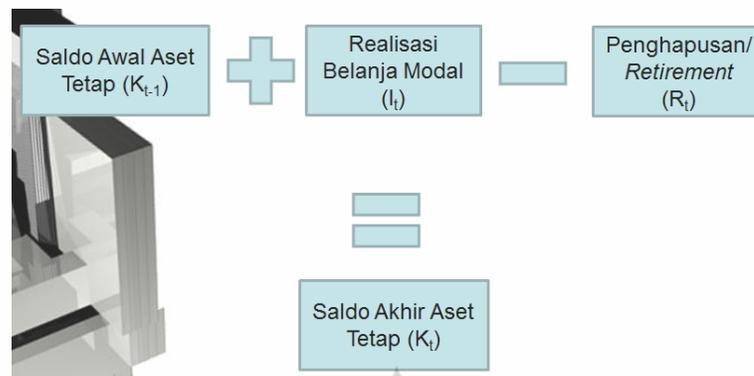
Dimana :

K = Kapital /Aset Tetap (*Fixed Asset/Capital Stock*)

I = Investasi /Belanja Modal (*Capital Flow/Spending/Expenditure*)

R= Penghapusan Kapital /Aset Tetap (*Retirement Asset*)

Yang jika disajikan dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut:



Gambar 3.4 : Alur *Perpetual Inventory Method* (PIM)

Dengan demikian Saldo Akhir Aset Tetap (K_t) merupakan penjumlahan antara Saldo Awal Aset Tetap (K_{t-1}) dengan Belanja Modal yang menjadi Aset Tetap (I_t).

4.2. Pengaruh pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo

Terkait dengan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal yang telah terbentuk tersebut maka salah satu peran penting Aset Tetap atau Modal Tetap dalam pembangunan ekonomi adalah pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang tercermin dari tingkat PDRB akan mengindikasikan bahwa kebutuhan layanan jasa pemerintah semakin besar, sehingga semakin besar pula dibutuhkan fasilitas publik yang dapat digunakan untuk melayani masyarakat secara langsung yang berupa Aset Tetap atau Modal Tetap.

Implikasi kebijakan dari adanya hubungan timbal balik antara Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pada pembuatan proyeksi/perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan tahunan dan target pertumbuhan ekonomi. Anggaran pembangunan tahunan

diimplikasikan dalam alokasi Belanja Modal pada APBD dan target pertumbuhan ekonomi diimplikasikan pada tingkat PDRB. Oleh sebab itu PDRB yang diteliti adalah PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tahun 2000.

Dengan memegang asumsi bahwa hubungan timbal balik tersebut terjadi, maka dalam membuat proyeksi ketersediaan/pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal harus memperhitungkan variabel pertumbuhan ekonomi; dan sebaliknya dalam memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi, variabel ketersediaan/pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal harus dijadikan salah satu faktor penentu.

Hubungan kausalitas secara timbal balik seperti yang digambarkan memang secara teoritis memungkinkan, namun faktanya seringkali hanya merupakan hubungan satu arah saja. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh antara PDRB dan pembentukan/ketersediaan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal apakah terjadi secara timbal balik atau satu arah saja (hanya PDRB yang mempengaruhi pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal atau hanya pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal yang mempengaruhi PDRB).

Dengan memahami hubungan kausalitas tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat melahirkan model proyeksi optimal berdasarkan hubungan kausalitas yang ada, melalui model analisis *Vector Auto Regression* (VAR). Model ini adalah model yang digunakan oleh Abustan dan Mahyuddin dalam penelitiannya mengenai Korelasi Antara Belanja Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan, Tahun 1985-2005 (Abustan & Mahyuddin:2009) kemudian dielaborasi dengan permasalahan pada penelitian ini.

Vector Auto Regression (VAR) biasanya digunakan untuk memproyeksikan sistem variabel-variabel runtut waktu dan untuk menganalisis dampak dinamis dari faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Pada dasarnya Analisis VAR bisa dipadankan dengan suatu model persamaan simultan, oleh karena dalam analisis VAR perlu mempertimbangkan beberapa variabel endogen secara bersama-sama dalam suatu model.

Perbedaannya dengan model persamaan simultan biasa adalah bahwa dalam analisis VAR masing-masing variabel selain diterangkan oleh nilainya di masa lampau, juga dipengaruhi oleh nilai masa lalu dari semua variabel endogen lainnya dalam model yang diamati. Di samping itu, dalam analisis VAR biasanya tidak ada variabel eksogen dalam model tersebut. (Abustan & Mahyuddin:2009).

Keunggulan dari analisis VAR antara lain adalah: (1) Sederhana metodenya karena tidak perlu khawatir untuk membedakan mana variabel endogen, mana variabel eksogen; (2) Estimasinya sederhana, dimana metode OLS biasa dapat diaplikasikan pada tiap-tiap persamaan secara terpisah; (3) Hasil perkiraan (*forecast*) yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dalam banyak kasus lebih bagus dibandingkan dengan hasil yang didapat dengan menggunakan model persamaan simultan yang kompleks sekalipun. Selain itu, analisis VAR juga merupakan alat analisis yang sangat berguna, baik di dalam memahami adanya hubungan timbal balik (*interrelationship*) antara variabel-variabel ekonomi, maupun di dalam pembentukan model ekonomi berstruktur (Abustan dan Mahyuddin:2009).

Analisis ini ditujukan untuk mengevaluasi secara empiris keterkaitan pengaruh pembentukan/ketersediaan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo terhadap PDRB dalam model bivariat. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan melakukan:

1. Pengujian unit root terhadap variabel Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dan variabel PDRB.

Uji akar unit (*unit root test*) ini digunakan untuk melihat apakah data yang diamati stationer atau tidak. Test ini sebenarnya hanya merupakan pelengkap dari analisis VAR, mengingat tujuan dari analisis VAR adalah untuk menilai adanya hubungan timbal balik di antara variabel-variabel yang diamati, dan bukan test untuk data. Akan tetapi, apabila data yang diamati adalah stationer, hal ini akan meningkatkan akurasi dari analisis VAR (Juanda, 2008; Nachrowi, 2006; dan Verbeek, 2006).

Model pengujian *unit root* pada variabel PDRB dan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal adalah menggunakan model pengujian *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF Test), di mana model ini mengasumsikan bahwa ε_t dari $\Delta Y = \delta Y + \varepsilon_{-1}$ adalah *independently* dan *identical distributed* (IID) variabel acak, dengan nilai rata-rata nol dan varians σ^2 konstan. Jika $\delta = 0$, maka ε_t adalah IID atau mempunyai *unit root*, dan data time series yang memiliki unit root disebut data non-stationary. Data *time series* dikatakan tidak mengandung unit root atau bersifat stationer jika nilai statistik ADF test lebih besar dari nilai kritis 10 persen.

2. Pengujian kausalitas *Granger* antara Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dan PDRB Kabupaten Gorontalo.

Dalam rangka membentuk model VAR antara PDRB dan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka metode analisis untuk melihat hubungan kausalitas antara variabel tersebut digunakan Uji Kausalitas *Granger*, di mana bentuk hubungan kausalitas *Granger* yang dimodelkan sebagai berikut:

$$PDRB_t = \sum a_t K_{ij} + u_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

dan

$$K_{ij} = \sum b_t PDRB_t + u_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

dimana

$PDRB_t$ = PDRB pada tahun t

K_{ij} = Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari
Belanja Modal pada tahun t sektor ke-j

a_t, b_t = Konstanta

u_{ij} = Faktor gangguan

Berdasarkan model regresi uji kausalitas *Granger* yang dimodelkan, maka hipotesis yang akan diuji adalah:

H0: PDRB tidak mempengaruhi (tidak menyebabkan) pembentukan/ketersediaan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo

H1: PDRB mempengaruhi (menyebabkan) pembentukan/ketersediaan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

H0: Pembentukan/ketersediaan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal tidak mempengaruhi (tidak menyebabkan) PDRB Kabupaten Gorontalo

H1: Pembentukan/ketersediaan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal mempengaruhi (menyebabkan) PDRB Kabupaten Gorontalo

Jika nilai probabilitas dari kedua hipotesis di atas lebih kecil dari nilai kesalahan yang dapat ditolerir ($\alpha = 0,05$) maka keduanya diputuskan untuk menolak H0, sehingga interpretasinya adalah PDRB dan Pembentukan/ketersediaan Aset Tetap atau Modal

Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo saling mempengaruhi secara timbal balik. Akan tetapi jika hanya satu hipotesis H_0 yang ditolak, berarti hubungan antara PDRB dan Pembentukan/ketersediaan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo hanya merupakan hubungan kausalitas yang satu arah.

3. Mendapatkan model *Vektor Auto Regressive* (VAR) yang sesuai untuk memproyeksi kebutuhan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dan target pertumbuhan ekonomi beberapa periode ke depan, berdasarkan hubungan kausalitasnya.

Atas dasar hasil uji kausalitas dengan metode Kausalitas *Granger test*, maka langkah selanjutnya adalah membentuk Model VAR. Jika ternyata berdasarkan hasil uji kausalitas pada persamaan (1) dan (2) menunjukkan hubungan yang saling mempengaruhi maka model VAR akan menjadi:

$$PDRB_t = a_{1j} + \sum \beta_{1t} K_{ij} + \varepsilon_t \dots\dots\dots (3)$$

dan

$$K_{ij} = a_{2i} + \sum \beta_{2t} PDRB_t + \varepsilon_t \dots\dots\dots (4)$$

Penentuan jumlah lag yang akan digunakan dalam menentukan model VAR adalah di dasarkan pada uji *Akaike Information Criterion* (AIC) dan *Schwarz Information Criterion* (SIC). Pengujian lag dilakukan di mulai dari Lag 2 dan berhenti pada lag yang lebih besar jika nilai AIC dan SIC sudah semakin kecil.

BAB 4 PEMBAHASAN

1. Latar belakang perhitungan Aset Tetap atau Modal Tetap

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) (Wicaksono et al : 2002) dinyatakan bahwa ketersediaan informasi yang berkaitan data stok kapital, dalam penelitian ini akan disebut dengan Aset Tetap atau Modal Tetap, masih terbatas pada pemanfaatan data investasi sebagai proksi untuk mensubstitusi kebutuhan data stok kapital.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia bekerjasama dengan BPS melakukan upaya penyempurnaan penghitungan Modal Tetap, sehingga diperoleh data Modal Tetap, yang akurat dan dapat dipercaya yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk analisis-analisis lainnya.

Hal ini juga terjadi pada pemerintah daerah, data mengenai Aset Tetap atau Modal Tetap juga masih terbatas. Pemerintah Kabupaten Gorontalo sendiri baru melakukan penyusunan laporan keuangannya pada tahun anggaran 2001. Laporan keuangan inilah yang dapat dijadikan dokumen dasar dalam perhitungan Aset Tetap atau Modal Tetap dengan metode langsung. Kondisi ini tentu saja berdampak pada pentingnya manfaat data Aset Tetap atau Modal Tetap itu sendiri bagi pembangunan ekonomi pemerintah daerah tersebut.

2. Batasan pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap dalam penelitian ini

Pengujian-pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada landasan teori yang telah dijabarkan dengan batasan atau asumsi tertentu. Batasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai maksud

dan tujuan penelitian. Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang diuji secara rinci hanya pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap berasal dari Belanja Modal

Sesuai dengan landasan teori Aset Tetap atau Modal Tetap dapat diperoleh dengan cara dibeli, dibangun, hibah (donasi) dan pertukaran. Dalam penelitian ini, pengujian lebih rinci terkait pembentukan/perolehan Aset Tetap atau Modal Tetap hanya dikhususkan pada pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang diperoleh dengan cara dibeli atau dibangun yang berasal dari Belanja Modal pada APBD Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam tahun anggaran 2000 - 2010.

Pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap selain yang berasal dari Belanja Modal seperti dari hibah maupun pertukaran hanya digunakan sebagai faktor yang melengkapi saldo/akumulasi data Aset Tetap atau Modal Tetap sesuai dengan definisi tentang Aset Tetap atau Modal Tetap.

2. Penilaian Aset Tetap atau Modal Tetap

Pengujian pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap dilakukan dengan Metode langsung DOC (*Direct Observation of Capital*) dimana data Aset Tetap atau Modal Tetap dikumpulkan atas dasar *historical cost*. Hal ini juga selaras dengan prinsip akuntansi yang berterima umum yang menganut penilaian Aset Tetap berdasarkan *historical cost* atau biaya perolehan.

Historical cost atau biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. *Historical cost* atau biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset

tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: (a) biaya persiapan tempat; (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*); (c) biaya pemasangan (*installation cost*); (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan (e) biaya konstruksi.

Terkait dengan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam nilai Aset Tetap, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mempunyai prosedur dan kebijakan pelaksanaan anggaran yang menetapkan bahwa alokasi penganggaran biaya-biaya tersebut disatukan dalam akun Belanja Modal pada APBD. Dengan kata lain alokasi anggaran pada akun Belanja Modal pada APBD termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam nilai Aset Tetap.

3. Pengecualian dalam pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap

Yang dimaksud Aset Tetap atau Modal Tetap dalam pengujian ini termasuk kategori Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Namun pada beberapa pengujian akan dilakukan tanpa memasukkan KDP sebagai Aset Tetap seperti saat pengujian saat pengakuan Belanja Modal sebagai faktor penambah/pembentuk Aset Tetap atau Modal Tetap.

Hal ini juga selaras dengan Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal pengakuan KDP yang dinyatakan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

3. Proses Pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo

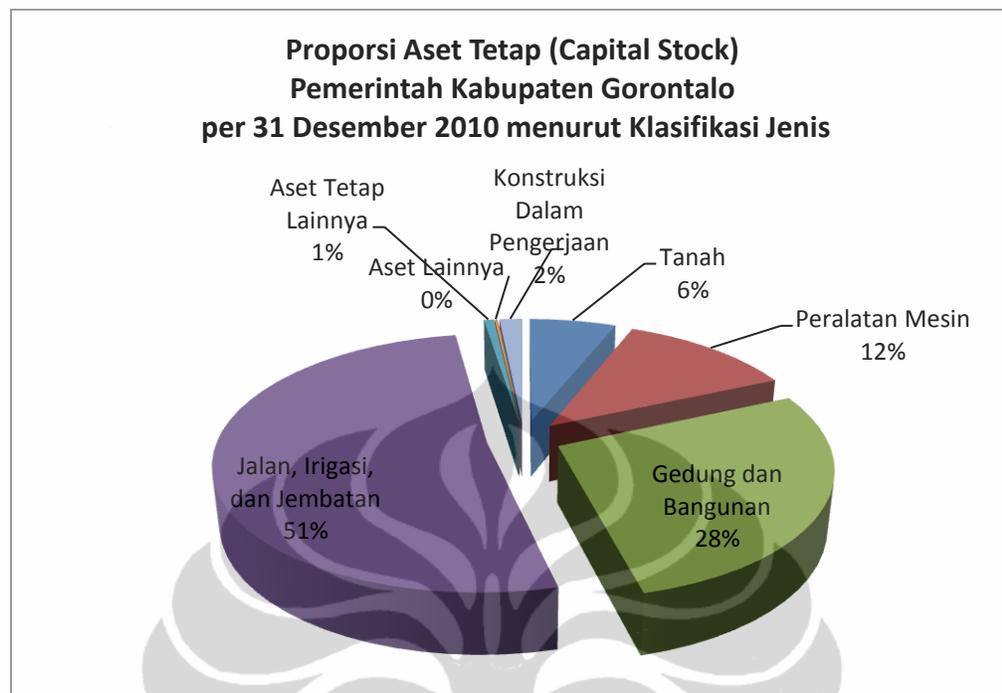
Pengujian proses pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap dilakukan dengan Metode langsung DOC (*Direct Observation of Capital*).

Dengan metode ini maka langkah pertama yang dilakukan adalah survei atau pengumpulan data secara langsung dari laporan keuangan yaitu Neraca Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun pelaporan 2001 – 2010.

Data untuk pengujian ini dari laporan Neraca ini hanya dilakukan untuk tahun anggaran 2001 – 2010 karena Pemerintah Kabupaten Gorontalo baru mulai menyusun Laporan Keuangan pada tahun pelaporan 2001. Dari laporan Neraca tersebut didapati bahwa pengklasifikasian Aset Tetap atau Modal Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo didasarkan pada klasifikasi Aset Tetap atau Modal Tetap menurut jenisnya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data akumulasi Aset Tetap atau Modal Tetap dilakukan dengan Metode langsung DOC (*Direct Observation of Capital*), maka hasil atau data Aset Tetap atau Modal Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2010 seperti dilihat pada Lampiran 1.

Berdasarkan data pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap hasil penelitian dengan metode DOC tersebut jika dilihat proporsi tiap jenisnya akan memberikan gambaran mengenai bidang investasi yang menjadi fokus dari Pemerintah kabupaten Gorontalo. Proporsi Aset Tetap atau Modal Tetap Pemerintah Kabupaten Gorontalo menurut klasifikasi jenis dari akumulasi Aset Tetap atau Modal Tetap per 31 Desember 2010 terlihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 4.1 : Proporsi Aset Tetap atau Modal Tetap (*Capital Stock*) Pemerintah Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2010 menurut Klasifikasi Jenis Aset

Dari hasil penelitian tersebut didapati bahwa proporsi Aset Tetap atau Modal Tetap untuk jenis Jalan, Irigasi, dan Jembatan pada tanggal pelaporan 31 Desember 2010 menempati porsi terbesar yaitu 51% dari seluruh (akumulasi) Aset Tetap atau Modal Tetap. Kemudian disusul dengan Gedung dan Bangunan 28%, serta Peralatan dan Mesin yang mempunyai porsi 12% dari seluruh (akumulasi) Aset Tetap atau Modal Tetap.

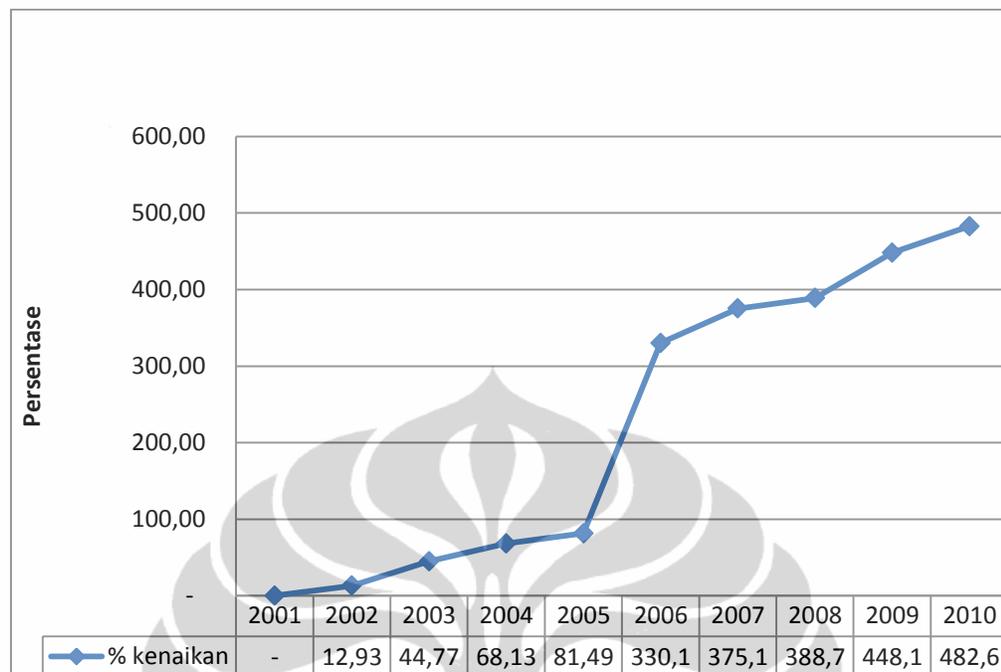
Jika dilihat dari persentase kenaikan jumlah Aset Tetap atau Modal Tetap dengan tahun dasar tahun 2001, tahun dimulainya penyusunan data Aset Tetap atau Modal Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka kenaikan terbesar atas data Aset Tetap atau Modal Tetap terjadi pada tahun 2009 dengan total kenaikan 448,1 % dari data Aset Tetap atau Modal Tetap pada tahun 2001. Namun lonjakan kenaikan Aset Tetap atau Modal Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo terjadi pada tahun 2006. Tahun 2005

kenaikan Aset Tetap atau Modal Tetap dari tahun 2001 hanya sebesar 81,49%, namun pada tahun 2006 kenaikannya sangat drastis yaitu sebesar 330,1%.

Keunggulan pengujian dengan metode langsung maka lonjakan seperti ini dapat diketahui penyebabnya bersamaan dengan saat pelaksanaan pengujian yang dilakukan dengan survei. Penyebab lonjakan kenaikan data Aset Tetap atau Modal Tetap pada tahun 2006 karena pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan penilaian kembali data Aset Tetap atau Modal Tetap yang dimiliki dan telah dilaporkan dalam laporan keuangan.

Alasan penilaian kembali ini dilakukan karena berdasarkan proses inventarisasi data Aset Tetap atau Modal Tetap didapati banyak Aset Tetap atau Modal Tetap yang tidak dapat dinilai dengan *historical cost* yang disebabkan kurangnya informasi pendukung nilai *historical cost*. Sesuai prinsip penilaian Aset Tetap atau Modal Tetap maka jika *historical cost* tidak dapat diperoleh maka Aset Tetap atau Modal Tetap dapat dinilai dengan *market value* atau harga pasar.

Penentuan nilai Aset Tetap atau Modal Tetap dengan harga pasar ini dilakukan oleh ahli di bidang penaksiran nilai Aset Tetap atau Modal Tetap. Kejadian ini berakibat naiknya nilai Aset Tetap atau Modal Tetap yang tidak disebabkan oleh penambahan investasi atau alokasi Belanja Modal. Kenaikan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.2. : Persentase Kenaikan Aset Tetap atau Modal Tetap (*Capital Stock*) dengan tahun dasar 2001 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo

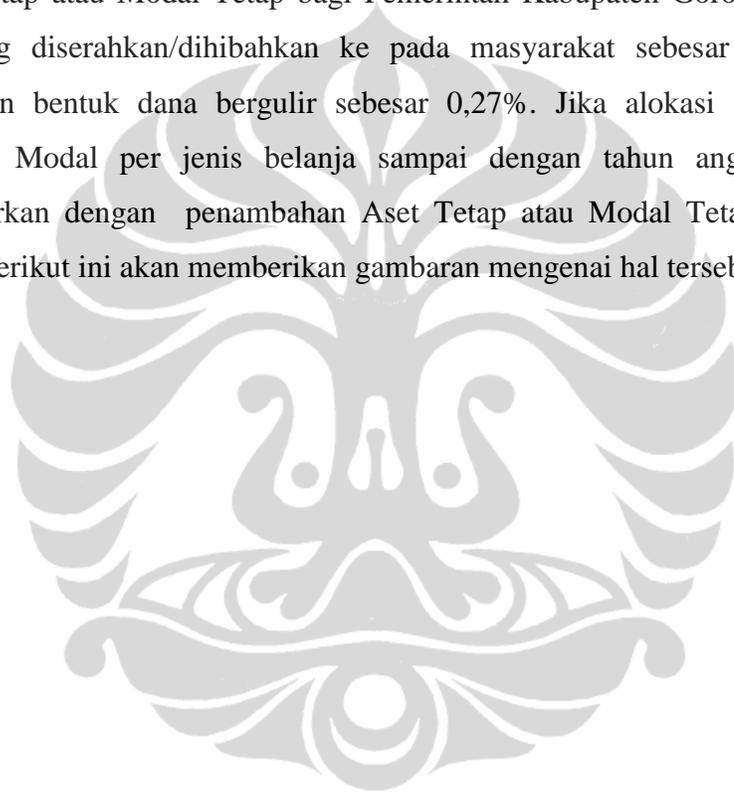
Data Aset Tetap atau Modal Tetap sesuai pengujian tersebut merupakan data yang dapat dijadikan dasar untuk analisis-analisis lainnya. Nilai Aset Tetap atau Modal Tetap yang telah terbentuk tersebut merupakan nilai akibat dari adanya suatu investasi. Investasi dalam operasional pemerintahan adalah dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang-barang modal atau Aset Tetap atau Modal Tetap.

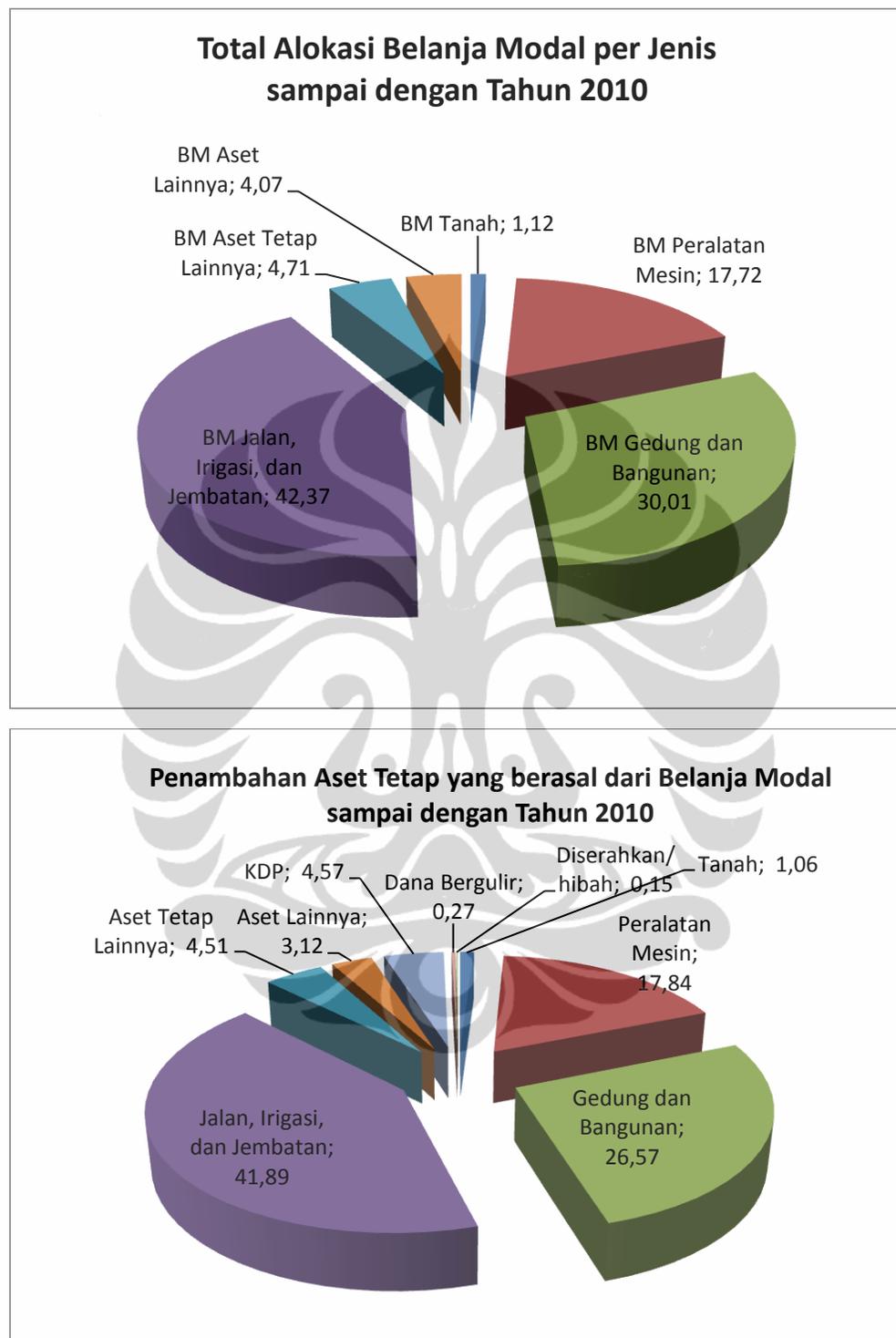
Masih dengan menggunakan metode langsung DOC, alokasi belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dari tahun anggaran 2001 – 2010 menyatakan bahwa total alokasi Belanja Modal yang mempunyai porsi terbesar dalam APBD adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan yaitu sebesar 42%; dan alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 30%.

Dari alokasi total Belanja Modal per jenis belanja sampai dengan tahun anggaran 2010 tersebut, dampak penambahan Aset Tetap atau Modal

Tetap-nya, berdasarkan pengujian metode DOC, tidak hanya berdampak pada keenam jenis Aset Tetap atau Modal Tetap-nya tersebut di atas. Terdapat realisasi dari Belanja Modal per jenis belanja tersebut yang terkategori pada Kontruksi Dalam Pengerjaan yang artinya bahwa proses pengerjaan untuk dapat menjadi Aset Tetap atau Modal Tetap belum selesai sebesar 4,57%.

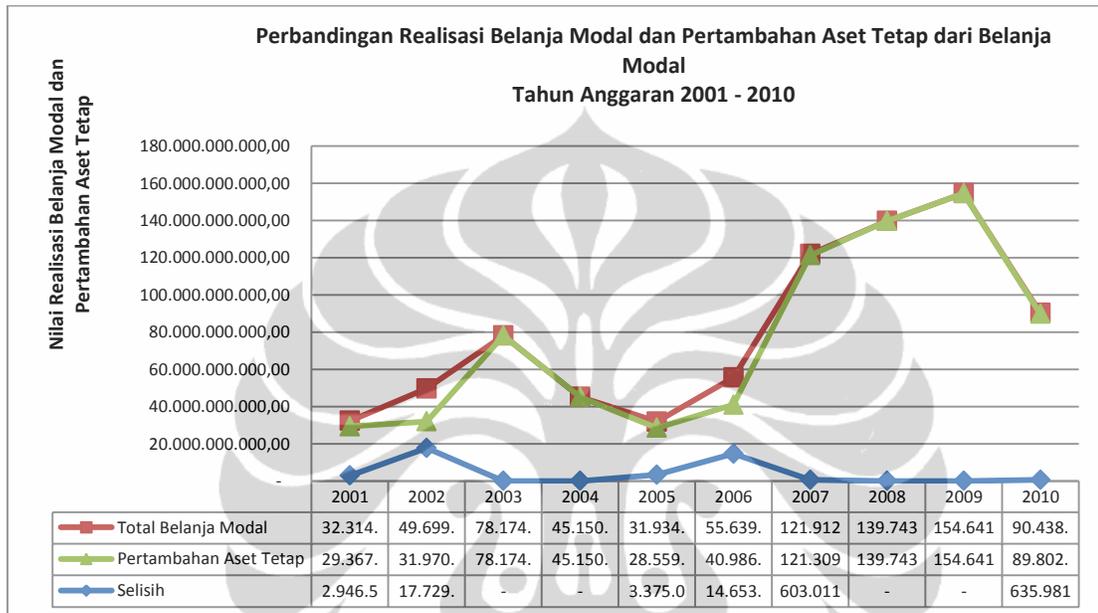
Selain itu juga terdapat realisasi Belanja Modal yang tidak menambah Aset Tetap atau Modal Tetap bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo karena langsung diserahkan/dihibahkan ke pada masyarakat sebesar 0,15% dan dijadikan bentuk dana bergulir sebesar 0,27%. Jika alokasi alokasi total Belanja Modal per jenis belanja sampai dengan tahun anggaran 2010 disejajarkan dengan penambahan Aset Tetap atau Modal Tetap-nya maka grafik berikut ini akan memberikan gambaran mengenai hal tersebut.





Gambar 4.3. : Perbandingan Total Alokasi Belanja Modal per jenis dan Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal tersebut sampai dengan Tahun 2010

Jika realisasi alokasi Belanja Modal dan penambahan Aset Tetap atau Modal Tetap-nya dari tahun anggaran 2001 hingga tahun anggaran 2010 diperbandingkan dari tahun ke tahun, maka dapat dijelaskan dengan grafik berikut ini:



Ket: Tahun 2008 terdapat proses penyerahan sebagian Aset Tetap ke Kabupaten baru

Gambar 4.4 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal dan Pertambahan Aset Tetap dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2001 – 2010

Gambar 4.4. menunjukkan bahwa pada tahun 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, dan 2010 terdapat alokasi Belanja Modal yang tidak berdampak pada pembentukan/penambahan Aset Tetap atau Modal Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo senilai Rp 39.942.776.786,00 atau 5% dari total alokasi Belanja Modal. Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal yang masih berupa KDP dan realisasi yang langsung diserahkan kepada masyarakat berupa hibah dan dana bergulir seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Jumlah Aset Tetap yang berupa KDP sebesar 4,57% merupakan Aset Tetap yang masih dalam proses pembangunan maupun yang telah selesai

pembangunannya namun secara administrasi belum diserahkan kepada pihak pemerintah daerah. Aset Tetap yang berupa KDP tersebut sesuai dengan kriteria pemanfaatan, maka KDP tersebut tetap terkategori dalam Aset Tetap jika sudah digunakan meskipun secara administrasi belum diserahkan. Dan berdasarkan hasil penelitian ini Aset Tetap yang berupa KDP disini adalah bangunannya belum selesai pembangunannya.

Sedangkan KDP yang sudah selesai pembangunannya dan telah dimanfaatkan berdasarkan observasi tetap dikategorikan ke dalam Aset Tetap sesuai dengan jenisnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alokasi Belanja Modal telah tepat menjadi faktor pembentuk Aset Tetap atau Modal Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan besaran 95% dari total alokasi Belanja Modal dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 termasuk Aset Tetap berupa KDP yang telah dimanfaatkan penggunaannya.

Namun demikian, terbuktinya pertambahan Aset Tetap atau Modal Tetap sesuai dengan pengalokasian Belanja Modal masih memerlukan pengujian validitasnya terhadap total data Aset Tetap atau Modal Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2010. Untuk melakukan pengujian validitas ini maka metode yang digunakan adalah *Perpetual Inventory Method* (PIM).

Dengan metode PIM maka data yang paling diandalkan adalah data PMTB atau Pembentukan Modal Tetap Bruto. PMTB berarti pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal (*capital goods*) untuk keperluan usaha/pelayanan. Barang modal yang mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun akan mengalami penyusutan baik secara teknis (usia pakai) maupun ekonomi (nilai). Dengan demikian jika hasil dari investasi yang dalam hal ini adalah realisasi dari Belanja Modal telah tepat menjadi Aset Tetap atau Modal Tetap maka data Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal merupakan PMTB.

Terkait dengan penyusutan Aset Tetap atau Modal Tetap, Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum menerapkan kebijakan mengenai penyusutan.

Maka dengan pengujian metode PIM, data pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan menjumlahkan saldo awal dari Aset Tetap atau Modal Tetap tahun sebelumnya dengan jumlah realisasi dari Belanja Modal pada tahun anggaran yang bersangkutan dikurangi dengan Aset Tetap atau Modal Tetap yang dihapuskan.

Aset Tetap atau Modal Tetap yang dihapuskan Aset Tetap atau Modal Tetap yang dihapuskan dapat disebabkan karena kerusakan yang sudah berat sehingga sudah tidak efisien lagi jika diperbaiki, dihibahkan kepada pihak lain atau masyarakat, dijual, kejadian luar biasa seperti kebakaran. Dari hasil pengujian validitas tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Hasil Pengujian Validitas Metode PIM tahun 2001 - 2010

Uraian	Saldo Awal	Akumulasi Realisasi Belanja Modal	Akumulasi Penghapusan	Saldo Akhir
Periode 1 (2001 - 2005)	245,577,188,842.00	237,273,524,313.75	37,143,596,964.56	445,707,116,191.19
Periode 2 (2006 - 2010)	1,056,231,823,693.00	562,375,786,961.47	187,799,307,401.68	1,430,808,303,252.79

Pengujian dilakukan dengan membagi 2 periode karena di dalam proses pengujian didapati bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan kebijakan penilaian kembali Aset Tetap atau Modal Tetap. Kebijakan penilaian kembali ini dilakukan pada tahun anggaran 2006. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo karena Aset Tetap atau Modal Tetap yang dimiliki belum dapat disajikan dinilai *historical cost*-nya sehingga harus dilakukan penilaian kembali sehingga nilai dari Aset Tetap atau Modal Tetap tersebut dapat *reliable*.

Dampak dari kebijakan ini menjadikan nilai Aset Tetap atau Modal Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo naik sekitar 42, 67% dari nilai Aset Tetap atau Modal Tetap per 31 Desember 2010 atau sebesar Rp 610.524.707.501.81. Kenaikan ini bukan merupakan kenaikan yang disebabkan oleh proses produksi maupun proses investasi (penambahan

realisasi dari Belanja Modal). Namun demikian proses penilaian kembali Aset Tetap atau Modal Tetap ini membuat nilai dari Aset Tetap atau Modal Tetap itu sendiri menjadi lebih *reliable* karena disesuaikan dengan *market value*-nya yang secara ekonomi menjadi lebih realistis.

4. Pengaruh pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo

Dengan melihat hasil pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal tersebut di atas, jika analisis pengaruh dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo dilakukan maka perlu adanya penyesuaian data Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal tersebut. Hal ini harus dilakukan karena perbedaan klasifikasi antara Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan klasifikasi yang digunakan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Data penelitian yang dijadikan sampel adalah tahun anggaran 2000 – 2010. Dalam pengujian tentang pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal hanya dilakukan atas data dari tahun 2001 – 2010. Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Gorontalo baru menyusun laporan keuangan pada tahun 2001. Dengan metode langsung DOC maka pengujian hanya dapat dilakukan dari laporan keuangan yang sudah tersusun.

Namun, untuk pengujian pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dan hubungannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengujian dapat dilakukan dengan data dari tahun 2000 – 2010 dengan asumsi-asumsi tertentu. Asumsi yang digunakan dalam pengujian ini, untuk realisasi belanja terkait dengan pengadaan Aset Tetap atau Modal Tetap pada tahun 2000 seluruh realisasi diperlakukan sebagai pembentuk Aset Tetap atau Modal Tetap.

Dengan kondisi demikian, data penambahan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo

diperbandingkan dari tahun anggaran 2000 – 2010 maka terdapat berbagai macam penyajian. Perbedaan penyajian ini dilihat dari penyajian APBD, Laporan Realisasi Anggaran, maupun Neraca. Dengan mendasarkan pada penyajian klasifikasi belanja pada APBD, maka data Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat diklasifikasikan kembali sesuai dengan tujuan penelitian.

Penyajian sesuai APBD dijadikan pedoman dalam pengklasifikasian karena penyajian dalam APBD ini yang dapat dijadikan jembatan dalam pengklasifikasian kembali data pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Perbedaan penyajian data dalam APBD ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun anggaran 2000 data realisasi APBD termasuk data penambahan aset tetap disajikan sesuai dengan sektor-sektor pembangunan.
2. Tahun anggaran 2001 – 2002 data realisasi APBD termasuk data penambahan aset tetap disajikan sesuai dengan klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan klasifikasi fungsi sesuai dengan hasil kerja Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).
3. Tahun anggaran 2003 – 2005 data realisasi APBD termasuk data penambahan aset tetap disajikan berdasarkan urusan kewenangan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri yaitu Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.

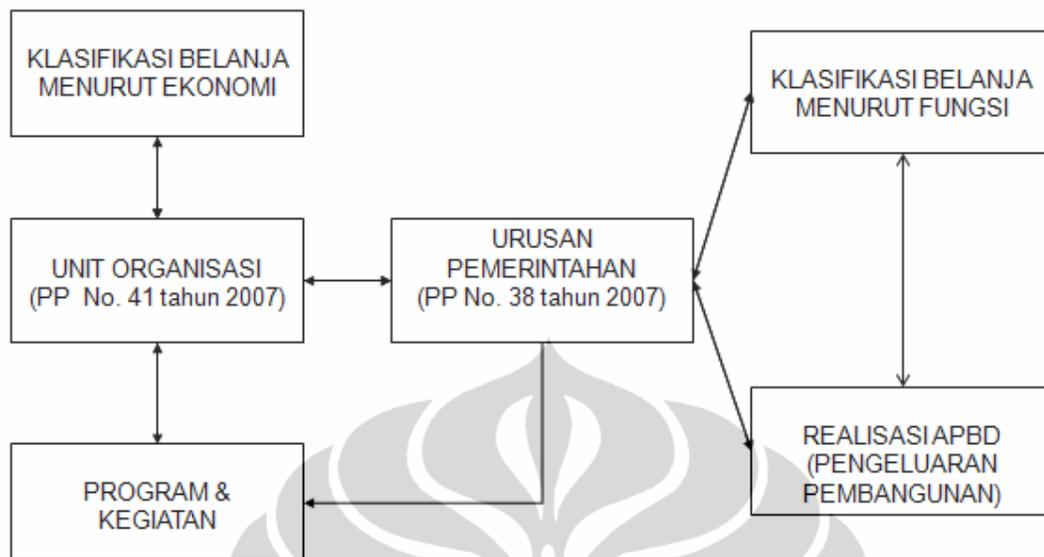
Dalam penyajian tahun ini, petunjuk teknis belum mensyaratkan penyajian laporan keuangan sesuai klasifikasi fungsi/bidang kewenangan.

4. Tahun anggaran 2006 – 2010 data realisasi APBD termasuk data penambahan aset tetap disajikan berdasarkan urusan kewenangan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Dengan petunjuk teknis ini penyajian laporan sesuai dengan klasifikasi fungsi sudah disarankan.

Dengan kondisi seperti tersebut di atas, maka *treatment* pengklasifikasian kembali data pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan dilakukan dengan metode yang berbeda-beda sesuai dengan keempat penyajian tersebut. Pengklasifikasian realisasi APBD yang didalamnya termasuk realisasi Belanja Modal yang menjadi pembentuk Aset Tetap atau Modal Tetap ke dalam fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara rinci akan dilakukan dengan teknik *vouching* dan kesepadanan.

Teknik *vouching* digunakan untuk menelusuri suatu informasi/data dalam suatu dokumen ke pencatatan pendukungnya menuju kepada adanya bukti pendukungnya (*voucher*-nya). Sedangkan teknik kesepadanan digunakan untuk mengklasifikasikan kembali suatu kategori ke kategori yang baru sehingga data dapat dibandingkan. Pengklasifikasian realisasi APBD ke dalam fungsi-fungsi pemerintahan tersebut dapat digambarkan tahapannya sebagai berikut:



Gambar 4. 5 : Tahapan pengklasifikasian realisasi APBD dengan teknik Kesepadanan

Dari gambar tahapan di atas dapat dijelaskan bahwa pengklasifikasian dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara tergantung dari ketersediaan data pada pemerintah daerah yang akan dilakukan penelitian. Ketiga cara pengklasifikasian tersebut adalah:

1. Pengklasifikasian dari realisasi belanja menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja (belanja operasi, belanja modal) ke realisasi belanja menurut klasifikasi fungsi (fungsi pemerintahan umum, fungsi ekonomi dan sebagainya) atau diklasifikasikan menurut sektor (realisasi APBD untuk pengeluaran pembangunan) atau akan disebut sebagai metode 1;

Jika klasifikasi belanja menurut ekonomi akan diklasifikasikan kembali menurut klasifikasi fungsi maka jenis belanja menurut klasifikasi ekonomi tersebut harus dilakukan *vouching* ke unit organisasi kemudian dilakukan *vouching* ke urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang sudah disepadankan dengan klasifikasi fungsi atau sektor (realisasi APBD untuk pengeluaran pembangunan).

Kemudian untuk dapat menelusuri data belanja tersebut maka dari unit organisasi juga dilakukan *vouching* ke Program dan Kegiatan yang telah dilakukan sinkronisasi dengan urusan pemerintahan dimana belanja tersebut dianggarkan dan direalisasikan.

2. Pengklasifikasian dari realisasi belanja menurut klasifikasi fungsi (fungsi pemerintahan umum, fungsi ekonomi dan sebagainya) atau diklasifikasikan menurut sektor (realisasi APBD untuk pengeluaran pembangunan) ke klasifikasi ekonomi (belanja operasi, belanja modal) atau disebut dengan metode 2;

Jika klasifikasi belanja menurut fungsi atau sektor (realisasi APBD untuk pengeluaran pembangunan) akan dilakukan klasifikasi kembali ke klasifikasi belanja menurut ekonomi, maka proses yang dilakukan adalah kebalikan dari proses klasifikasi belanja menurut ekonomi ke klasifikasi belanja menurut fungsi atau sektor (realisasi APBD untuk pengeluaran pembangunan).

3. Pengklasifikasian dari realisasi belanja menurut klasifikasi fungsi (fungsi pemerintahan umum, fungsi ekonomi dan sebagainya) diklasifikasikan kembali menurut sektor (realisasi APBD untuk pengeluaran pembangunan) atau sebaliknya dan selanjutnya akan disebut sebagai metode 3.

Cara pengklasifikasian kembali dengan model ini merupakan cara yang paling mudah dibanding dengan kedua cara di atas. Cara ini hanya dilakukan dengan melakukan identifikasi kesepadanan antara sektor dengan fungsi. Secara teori, sektor dan fungsi mempunyai tujuan yang sama, namun pengkategorianya berbeda. Misalnya beberapa sektor dalam pengklasifikasian sebelum terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sudah tidak dikategorikan ke dalam fungsi yang menjadi wewenang pemerintah daerah, namun sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai contoh adalah sektor agama. Sektor ini sudah tidak menjadi wewenang pemerintah daerah, sehingga ketika akan diklasifikasikan

kembali ke klasifikasi belanja menurut fungsi akan terjadi ketidaksinambungan alur data. Oleh sebab itu kesepadanan sektor dan fungsi akan menjadi kunci utama dalam melakukan pengklasifikasian kembali realisasi belanja menurut klasifikasi fungsi (fungsi pemerintahan umum, fungsi ekonomi dan sebagainya) diklasifikasikan kembali menurut sektor (realisasi APBD untuk pengeluaran pembangunan) atau sebaliknya.

Dalam membuat kesepadanan antara sektor dan fungsi maka hasil kerja dari Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001) dapat menjadi acuan kesepadanan sektor dan fungsi untuk melakukan pengklasifikasian kembali. Pertama kali sektor belanja pembangunan dilakukan kesepadanan dengan FUNGSI GFS sesuai Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001). Kemudian kesepadanan fungsi sesuai hasil kerja Tim Pokja ini dilakukan kesepadanan fungsi dengan fungsi Permendagri No. 13 Tahun 2006. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat perbedaan pengkategorian fungsi antara Tim Pokja dan Permendagri. Namun perbedaan ini justru dapat menjadi jembatan yang sangat berarti dalam melakukan kesepadanan.

Pengklasifikasian kembali dari klasifikasi belanja menurut klasifikasi menurut ekonomi ke klasifikasi fungsi atau sektor (realisasi APBD untuk pengeluaran pembangunan) seperti dimaksudkan pada metode 1 di atas, tahapannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mendefinisikan unit organisasi dimana realisasi belanja menurut klasifikasi ekonomi tersebut terjadi.

Hal ini sangat diperlukan untuk dapat mengetahui penjabaran dari belanja menurut klasifikasi ekonomi tersebut sehingga dapat dilakukan

proses *vouching* lebih lanjut. Pendefinisian ini dapat dilakukan dengan melihat anggaran per unit organisasi yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dari seluruh SKPD yang ada di pemerintah daerah penelitian.

2. Mendefinisikan kesepadanan unit organisasi pada pemerintah daerah yang bersangkutan dengan unit organisasi sesuai urusan pemerintahan.

Kesepadanan unit organisasi pada pemerintah daerah dengan unit organisasi sesuai urusan pemerintahan akan memberikan informasi bahwa suatu unit organisasi akan diklasifikasikan dalam suatu urusan pemerintahan tertentu. Urusan pemerintahan merupakan dasar penyusunan unit organisasi dan tata kerja suatu pemerintah daerah. Kesepadanan unit organisasi pada pemerintah daerah yang bersangkutan dengan unit organisasi sesuai urusan pemerintahan akan memungkinkan penelusuran posisi unit organisasi pada suatu pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 telah mengklasifikasikan unit organisasi sesuai dengan urusan pemerintahan tersebut sehingga kesepadanan unit organisasi pada pemerintah daerah dapat disepadankan dengan unit organisasi sesuai urusan pemerintahan. Daftar kesepadanan unit organisasi pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan unit organisasi sesuai klasifikasi Permendagri No. 13 Tahun 2006.

3. Sinkronisasi urusan pemerintahan dengan program dan kegiatan

Data ini akan memberikan informasi pengklasifikasian yang tepat terhadap realisasi APBD pada proses *vouching* sehingga data dapat diyakini validitasnya ketika dapat ditelusuri ke dalam tataran data yang lebih rinci. Dari hasil *vouching* kesepadanan unit organisasi dengan urusan kewenangan maka data dapat dilakukan *vouching* yang lebih rinci lagi dengan melihat program dan kegiatan pada unit organisasi tersebut. Dengan hasil *vouching* ke program dan kegiatan maka akan diketahui kelompok urusan dari belanja APBD yang telah terealisasi.

4. Sinkronisasi urusan pemerintahan dengan klasifikasi fungsi atau sektor (realisasi APBD untuk pengeluaran pembangunan)

Sinkronisasi ini akan berguna untuk dapat mensejajarkan hasil *vouching* dari program dan kegiatan yang telah diketahui kelompok urusan pemerintahannya dari belanja APBD yang telah terealisasi dengan klasifikasi fungsi atau sektor (realisasi APBD untuk pengeluaran pembangunan).

Kemudian secara rinci pengklasifikasian kembali dari klasifikasi belanja menurut klasifikasi fungsi atau sektor (realisasi APBD untuk pengeluaran pembangunan) ke klasifikasi menurut ekonomi seperti dimaksud pada metode 2, maka tahapan dari proses pengklasifikasian ini dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Mendefinisikan kesepadanan antara sektor dengan urusan kewenangan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

Definisi kesepadanan antara sektor dan urusan kewenangan pemerintah akan menjadi titik tolak dalam melakukan pengolahan suatu data sehingga dapat dilakukan klasifikasi kembali ke dalam klasifikasi lain sesuai dengan yang dikehendaki. Kesepadanan antara sektor dengan urusan kewenangan pemerintah. Dengan kesepadanan antara sektor dan urusan kewenangan ini maka setiap realisasi APBD dari suatu sektor akan dapat disejajarkan dengan realisasi pada kategori urusan kewenangan sesuai hasil kesepadanan.

Namun demikian atas hasil kesepadanan ini, tentu tidak semua data dapat dengan mulus disepadankan begitu saja. Ada beberapa kesulitan yang akan terjadi dalam melakukan kesepadanan realisasi APBD terutama jika terdapat satu sektor namun kemudian terbagi dalam dua atau lebih urusan kewenangan. Untuk mengatasi kelemahan ini maka proses *vouching* harus dilakukan ke tingkat data yang lebih rinci.

Dengan tataran data yang lebih rinci diharapkan informasi yang diperoleh menjadi lebih komprehensif. Tataran data yang lebih rinci tersebut dapat dilihat pada realisasi APBD pada unit organisasi yang ada pada suatu pemerintah daerah. Lebih lanjut mengenai hal ini akan diuraikan dalam uraian pada nomor 2 di bawah ini.

2. Mendefinisikan kesepadanan unit organisasi pada pemerintah daerah yang bersangkutan dengan unit organisasi sesuai urusan kewenangan.

Kesepadanan unit organisasi pada pemerintah daerah dengan unit organisasi sesuai urusan kewenangan akan memberikan informasi bahwa suatu unit organisasi akan diklasifikasikan dalam suatu urusan kewenangan tertentu. Dengan langkah ini maka kesepadanan sektor dan urusan kewenangan dapat ditelusuri dari posisi unit organisasi pada suatu pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan posisi unit organisasi sesuai klasifikasi pada Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Daftar kesepadanan unit organisasi pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan unit organisasi sesuai klasifikasi Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan pada nomor 1 yang menyatakan jika terdapat satu sektor namun terbagi dalam dua atau lebih urusan kewenangan maka hal ini dapat diatasi dengan melihat data sesuai kesepadanan unit organisasi ini. Misalnya Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi. Dalam sektor ini jika disepadankan dengan urusan kewenangan maka akan disepadankan dengan urusan kewenangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Untuk mengetahui berapa besaran nilai realisasi APBD dari masing-masing urusan kewenangan ini maka dapat dilakukan *vouching* data realisasi sesuai dengan unit organisasi masing-masing. Oleh sebab itu data lebih rinci mengenai realisasi APBD per unit organisasi serta kesepadanan unit organisasi pada pemerintah daerah dengan unit

organisasi sesuai klasifikasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjadi perlu untuk dapat menelusuri data dalam rangka re-klasifikasi dengan validitas data yang baik.

3. Sinkronisasi program dan kegiatan dengan urusan kewenangan

Data ini akan memberikan informasi pengklasifikasian yang tepat terhadap realisasi APBD pada proses *vouching* sehingga data dapat diyakini validitasnya ketika dapat ditelusuri ke dalam tataran data yang lebih rinci. Dengan mengambil contoh Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi yang disepadankan dengan urusan kewenangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di atas, maka untuk mengetahui berapa besaran nilai realisasi APBD dari masing-masing urusan kewenangan ini dilakukan *vouching* data realisasi sesuai dengan unit organisasi masing-masing.

Dari hasil *vouching* ke unit organisasi ini maka *vouching* akan dilakukan lagi dengan melihat program dan kegiatan pada unit organisasi tersebut. Dengan hasil *vouching* ke program dan kegiatan maka akan diketahui sifat dari belanja APBD yang telah terealisasi. Dengan mengetahui informasi data yang telah dilakukan *vouching* ke program dan kegiatan maka klasifikasi belanja menurut ekonomi dapat diketahui dengan cara menjumlahkan setiap jenis belanja dalam program dan kegiatan tersebut.

Sedangkan untuk cara pengklasifikasian pada point 3 di atas sudah dijelaskan secara rinci pada point dimaksud. Yang harus diperhatikan dalam cara pengklasifikasian ini adalah persyaratan/asumsi atau batasan yang digunakan. Metode pengklasifikasian seperti tersebut di atas akan dapat memberikan hasil pengklasifikasian yang dapat dipercaya dan disajikan secara wajar jika beberapa syarat berikut ini dapat dipenuhi. Beberapa persyaratan tersebut adalah:

1. Data APBD dan realisasinya merupakan data dasar yang dipercayai.

Artinya bahwa data ini merupakan data yang diterima sebagai data yang benar tanpa melihat proses penganggaran dan realisasi yang dilakukan karena kebenaran dan ketepatan penganggaran dan realisasinya merupakan proses tersendiri yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Data APBD dan realisasinya merupakan data yang lengkap.

Data yang lengkap artinya bahwa data tersebut disertai dengan data pendukung dari APBD suatu pemerintah daerah hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) per unit organisasi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknik *vouching* dalam meyakini data yang ada. *Vouching* (Pemeriksaan Bukti Pendukung) adalah menelusuri suatu informasi/data dalam suatu dokumen ke pencatatan pendukungnya menuju kepada adanya bukti pendukungnya (*voucher*-nya); atau menelusur mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan atau pemeriksaan dokumen yang mendukung suatu transaksi atau jumlah yang telah tercatat.

3. Realisasi belanja pembangunan per sektor merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang dan jasa (honorarium dan belanja lainnya) Meskipun belanja pembangunan per sektor ini tidak murni belanja modal, namun dilihat dari definisi penambahan aset tetap dapat diterima karena konsep harga perolehan atau *historical cost* yang dianut dalam akuntansi (PP No.24 Tahun 2005).

Metode-metode pengklasifikasian kembali seperti diuraikan di atas, akan menjelaskan bahwa data Pemerintah Kabupaten Gorontalo, jika akan diklasifikasikan kembali ke dalam klasifikasi fungsi akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk data realisasi tahun anggaran 2000 yang disajikan sesuai dengan sektor-sektor pembangunan (pengeluaran pembangunan) termasuk data penambahan aset tetapnya maka metode yang digunakan untuk

mengklasifikasikan kembali ke klasifikasi fungsi adalah dengan metode pengklasifikasian pada metode 3.

2. Data realisasi APBD tahun anggaran 2001 – 2002 termasuk data penambahan aset tetap disajikan sesuai dengan klasifikasi ekonomi dan klasifikasi fungsi sesuai dengan hasil kerja Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001). Dengan data ini maka metode pengklasifikasian kembali yang digunakan adalah metode pengklasifikasian dengan metode 1 yang dimodifikasi pada kesepadanan fungsi sesuai hasil kerja Tim Pokja ini dengan fungsi yang dinyatakan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat perbedaan pengkategorian fungsi antara Tim Pokja dan Permendagri.
3. Tahun anggaran 2003 – 2005 data penambahan aset tetap disajikan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri yaitu Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Dalam penyajian tahun ini, petunjuk teknis belum mensyaratkan penyajian laporan keuangan sesuai klasifikasi fungsi/bidang kewenangan. Dengan demikian maka metode pengklasifikasian kembali yang dapat digunakan adalah metode pengklasifikasian dengan metode 1. Meskipun dalam petunjuk teknis yang digunakan tidak mensyaratkan penyajian laporan keuangan sesuai klasifikasi fungsi, namun Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyajikannya sesuai fungsi yang dihasilkan oleh Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001). Oleh sebab itu metode pengklasifikasian untuk data tahun anggaran ini juga dilakukan modifikasi kesepadanan fungsi.
4. Tahun anggaran 2006 – 2010 data realisasi APBD termasuk data penambahan aset tetap disajikan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Dengan demikian metode pengklasifikasian kembali yang dapat digunakan adalah metode pengklasifikasian dengan metode 1.

Berdasarkan metode-metode pengklasifikasian seperti dijelaskan di atas, dengan mengambil data penambahan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2000 – 2010 maka seluruh data tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam klasifikasi fungsi.

Dari klasifikasi fungsi sebagaimana dimaksud di atas, dalam kaitannya dengan penambahan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2000 – 2010 dapat berupa aset-aset sebagai berikut:

1. Pelayanan umum

Aset Tetap dalam fungsi pelayanan umum ini berupa tanah yang berupa tanah kantor pemerintah; gedung dan bangunan seperti gedung kantor pemerintah; peralatan dan mesin seperti meja, kursi, lemari, kendaraan dinas dan sebagainya; dan aset tetap lainnya seperti buku-buku yang tujuannya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pertahanan *)

Fungsi ini biasanya terdiri dari alat-alat persenjataan seperti senjata api, kapal selam, pesawat tempur dan sebagainya yang tujuannya digunakan untuk kegiatan pertahanan serta bela negara. Fungsi ini tidak ada di pemerintah daerah karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

3. Ketertiban dan ketentraman

Aset Tetap dari fungsi ini berupa tanah yang digunakan untuk bangunan kantor; peralatan dan mesin yang berupa kendaraan dinas, meja, kursi, filing kabinet dan sebagainya; serta gedung dan bangunan seperti bangunan kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk mendukung operasional atau pelaksanaan tugas dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan wilayah di lingkungan pemerintah daerah.

4. Ekonomi

Fungsi ini terhimpun aset tetap yang berasal dari belanja modal merupakan aset tetap yang digunakan untuk tujuan peningkatan kegiatan ekonomi di suatu wilayah pemerintah daerah yang berupa tanah yang digunakan untuk bangunan kantor; peralatan dan mesin yang berupa kendaraan dinas, meja, kursi, filing kabinet dan sebagainya; gedung dan bangunan seperti bangunan kantor dan fasilitas pendukung perekonomian seperti terminal, pasar, dan pelabuhan; jalan, irigasi, dan jaringan meliputi jaringan listrik, telepon, dan air; serta aset tetap lainnya yang berupa hewan ternak dan tumbuhan yang dibudidayakan.

5. Lingkungan hidup

Fungsi Lingkungan hidup ini merupakan fungsi yang ditujukan untuk melestarikan lingkungan di suatu wilayah pemerintah daerah. Aset tetap yang berasal dari belanja modal dapat berupa peralatan dan mesin yang berupa kendaraan dinas, meja, kursi, filing kabinet dan sebagainya; gedung dan bangunan seperti bangunan kantor yang terkait dengan konservasi lingkungan hidup; dan aset tetap lainnya yang berupa buku-buku penyuluhan lingkungan.

6. Perumahan dan fasilitas umum

Aset tetap dari fungsi ini merupakan aset tetap yang bertujuan atau digunakan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Aset tetap dari belanja modal dalam fungsi ini berupa tanah yang digunakan untuk bangunan kantor, bangunan rumah dinas, jalan, jembatan, maupun sarana publik lainnya; peralatan dan mesin yang berupa kendaraan dinas, meja, kursi, filing kabinet dan sebagainya; serta gedung dan bangunan seperti bangunan kantor, rumah, mess, yayasan, jalan, jembatan, irigasi dan bangunan publik lainnya.

7. Kesehatan

Aset tetap fungsi ini merupakan aset tetap yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Aset tetap dari belanja modal dalam fungsi ini berupa tanah yang digunakan untuk bangunan dan bangunannya sendiri yang berupa kantor, rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu, posyandu dan sebagainya; peralatan dan mesin yang dapat berupa alat-alat kesehatan seperti x-ray, alat ukur tekanan darah, dan sebagainya;

8. Pariwisata dan budaya

Aset tetap yang terdapat dalam fungsi ini meliputi aset tetap yang berasal dari belanja modal yang berupa tanah dan bangunan yang ditujukan untuk peningkatan pembangunan pariwisata di wilayah pemerintah daerah yang digunakan untuk kantor pariwisata, tempat pertunjukan, museum, kebun binatang, wisata danau dan sebagainya; peralatan dan mesin seperti kendaraan dinas yang diperuntukkan untuk operasional pariwisata; aset tetap lainnya seperti buku-buku tentang obyek wisata.

9. Agama *)

Fungsi ini merupakan fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun pada tahun anggaran 2000 sebagian kewenangan mengenai keagamaan masih diserahkan ke pemerintah daerah. Aset tetap dari belanja modal yang tercakup dalam fungsi ini peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya seperti buku-buku tentang keagamaan.

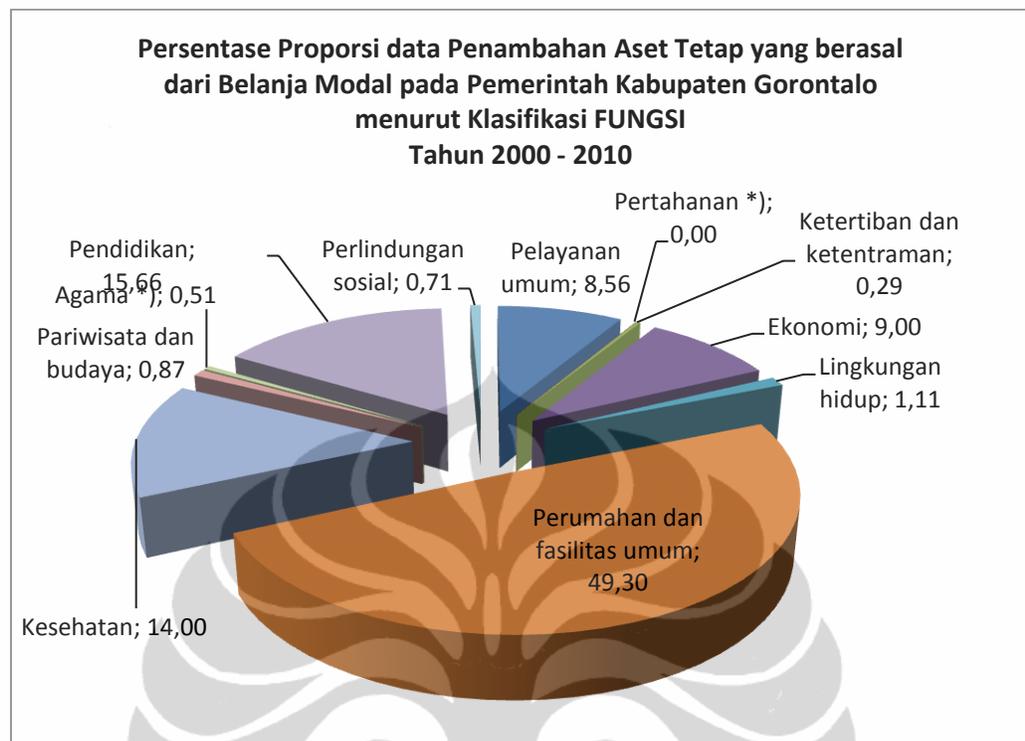
10. Pendidikan

Fungsi ini merupakan fungsi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di wilayah pemerintah daerah. Aset tetap dari belanja modal dalam fungsi ini berupa tanah yang digunakan untuk bangunan dan bangunannya sendiri yang berupa kantor, sekolah, taman bermain, sarana olahraga dan sebagainya; peralatan dan mesin yang dapat berupa meja sekolah, kursi, lemari, kendaraan dinas, dan sebagainya; serta aset tetap lainnya yang berupa buku-buku perpustakaan.

11. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial merupakan fungsi yang bertujuan untuk memberikan solusi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat yang ada pada suatu pemerintah daerah. Aset tetap yang berasal dari belanja modal digunakan sebagai sarana atau fasilitas yang mendukung tercapainya tujuan fungsi ini. Aset tetap dari belanja modal dalam fungsi ini berupa tanah dan bangunan seperti panti sosial, panti jompo, pusat latihan kerja dan sebagainya; peralatan dan mesin seperti meja, kursi, tempat tidur, lemari dan sebagainya.

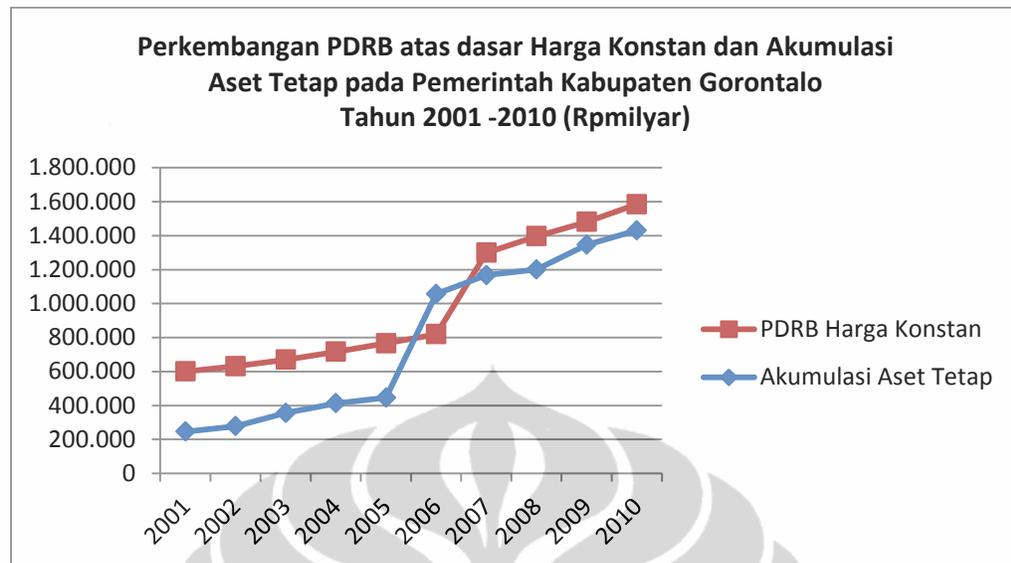
Dari hasil pengklasifikasian kembali data penambahan Aset Tetap (*Capital Stock*) yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2000 - 2010 dapat dilihat bahwa fungsi perumahan dan fasilitas umum mempunyai porsi terbesar yaitu 49,30%, diikuti fungsi pendidikan 15,66%, dan fungsi kesehatan 14% dari total data penambahan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal tahun 2000 – 2010. Lebih lengkap mengenai hasil pengklasifikasian kembali data penambahan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2000 – 2010 ke dalam klasifikasi fungsi terlihat pada grafik di bawah ini:



Ket : *) merupakan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

Gambar 4.6. : Persentase Proporsi data Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo menurut Klasifikasi FUNGSI Tahun 2000 – 2010

Dengan melihat pada perkembangan PDRB Kabupaten Gorontalo atas dasar harga konstan untuk tahun 2001 – 2010 jika dibandingkan dengan perkembangan akumulasi Aset Tetap atau Modal Tetap pada tahun pelaporan 2001 – 2010 terlihat bahwa perkembangan antara keduanya menunjukkan perkembangan yang cukup baik seperti terlihat pada grafik berikut ini:



Gambar 4. 7. : Perkembangan PDRB atas dasar Harga Konstan dan Akumulasi Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2001 -2010 (Rp milyar)

Atas dasar perkembangan data seperti di atas maka analisis hubungan antara penambahan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo akan dilakukan sesuai dengan model VAR (3) dan (4).

1. Pengujian unit root terhadap variabel Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dan variabel PDRB

Berdasarkan hasil pengujian unit root *Augmented Dickey-Fuller Test Fisher* (ADF Test) secara individual, variabel Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dan variabel PDRB secara signifikan mengandung unit root yang berarti data tidak stationer untuk kedua variabel tersebut. Derajat integrasi data ini adalah pada *first different* atau maksimum lags adalah 1, yang berarti bahwa data bersifat stationer pada *first different*.

2. Pengujian kausalitas *Granger* antara Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dan PDRB Kabupaten Gorontalo.

Pengujian kausalitas *granger* ini menyatakan bahwa:

H0: Pembentukan/ketersediaan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal tidak mempengaruhi (tidak menyebabkan) PDRB Kabupaten Gorontalo

H1: Pembentukan/ketersediaan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal mempengaruhi (menyebabkan) PDRB Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil pengujian data penambahan/pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal terhadap PDRB Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 : Hasil Pengujian Kausalitas *Granger* Aset Tetap dari Belanja Modal per Fungsi terhadap PDRB

Aset Tetap dari Belanja Modal per Fungsi	Probabilitas Granger	Hasil
Pelayanan umum	0,72479	Tidak mempengaruhi
Pertahanan *)	NA	NA
Ketertiban dan ketentraman	0,95798	Tidak mempengaruhi
Ekonomi	0,75984	Tidak mempengaruhi
Lingkungan hidup	0,71328	Tidak mempengaruhi
Perumahan dan fasilitas umum	0,39374	Mempengaruhi
Kesehatan	0,58192	Tidak mempengaruhi
Pariwisata dan budaya	0,04594	Mempengaruhi
Agama *)	0,77273	Tidak mempengaruhi
Pendidikan	0,52254	Tidak mempengaruhi
Perlindungan sosial	0,82199	Tidak mempengaruhi

*) Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil uji kausalitas *Granger* untuk pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal Per Fungsi terhadap pertumbuhan PDRB, ditemukan bahwa hanya Aset Tetap atau Modal Tetap dari fungsi Pariwisata dan Budaya; serta Perumahan dan Fasilitas Umum yang menyatakan bahwa Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal mempengaruhi (menyebabkan) pertumbuhan PDRB Kabupaten Gorontalo.

Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal untuk fungsi Pariwisata dan Budaya dengan tingkat probabilitas 0.04594 dan untuk fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dengan tingkat probabilitas 0.39374. Semuanya diukur dengan tingkat $\alpha = 0,05$. Sehingga hipotesis H_0 ditolak untuk Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal fungsi Pariwisata dan Budaya; serta Perumahan dan Fasilitas Umum.

Fungsi Pariwisata dan Budaya mempunyai dampak yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB karena Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupa tanah dan bangunan museum, fasilitas wisata, kebun binatang, danau dan buku-buku pariwisata. Jenis aset tetap tersebut ketika difungsikan sesuai tujuannya akan mendorong penggunaan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran serta peningkatan penerimaan daerah dari pariwisata. Hal-hal tersebut pada gilirannya akan berpengaruh pada pertumbuhan PDRB wilayah tersebut.

Sedangkan Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mempunyai dampak yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB karena Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupa tanah yang digunakan untuk bangunan kantor, bangunan rumah dinas, jalan, jembatan, maupun saran publik lainnya; peralatan dan mesin yang berupa kendaraan dinas, meja, kursi, filing kabinet dan sebagainya; serta gedung dan bangunan seperti bangunan kantor, rumah, mess, yayasan, jalan, jembatan, irigasi dan bangunan publik lainnya. Aset tetap tersebut akan memberi dampak secara langsung pada masyarakat karena jalan, jembatan serta jaringan yang dibangun secara teori akan memberikan dampak terhadap akses serta mobilitas masyarakat dan hasil produksi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sedangkan untuk pengujian kausalitas *granger* yang menyatakan bahwa:

- H0: PDRB tidak mempengaruhi (tidak menyebabkan) pembentukan/ketersediaan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo
- H1: PDRB mempengaruhi (menyebabkan) pembentukan/ ketersediaan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Sesuai dengan hasil pengujian kausalitas *Granger* maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 : Hasil pengujian kausalitas *Granger* PDRB terhadap Pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal per Fungsi

Aset Tetap dari Belanja Modal per Fungsi	Probabilitas Granger	Hasil
Pelayanan umum	0,27007	Mempengaruhi
Pertahanan *)	NA	NA
Ketertiban dan ketentraman	0,11999	Mempengaruhi
Ekonomi	0,00919	Mempengaruhi
Lingkungan hidup	0,24504	Mempengaruhi
Perumahan dan fasilitas umum	0,21626	Mempengaruhi
Kesehatan	0,32951	Mempengaruhi
Pariwisata dan budaya	0,58787	Tidak Mempengaruhi
Agama *)	NA	NA
Pendidikan	0,06944	Mempengaruhi
Perlindungan sosial	0,02300	Mempengaruhi

*) Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat

Dari tabel pengujian pengaruh PDRB terhadap Pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal Per Fungsi ditemukan bahwa hanya Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo fungsi Pariwisata dan Budaya yang mempunyai nilai probabilitas 0.58787 dengan tingkat $\alpha = 0,05$ dan fungsi Agama yang data probabilitanya N/A yang menerima H0.

Yang berarti bahwa PDRB mempengaruhi (menyebabkan) pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja

Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk semua fungsi kecuali fungsi Pariwisata dan Budaya; dan Agama.

Dengan demikian, dilihat dari kedua hubungan kausalitas *granger* tersebut yang mempunyai hubungan timbal balik antara PDRB dan pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo hanya pada klasifikasi fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum merupakan fungsi yang didalamnya termasuk Aset Tetap atau Modal Tetap yang berupa jalan, irigasi dan jembatan yang tentu saja secara teori ekonomi merupakan barang publik dan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan usahanya dan pada gilirannya akan dapat memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Dan pertumbuhan PDRB juga akan memberikan dampak terhadap prioritas pembangunan dan perbaikan fasilitas-fasilitas umum tersebut.

3. Pengujian model *Vektor Auto Regressive* (VAR)

Atas dasar pengujian kausalitas tersebut di atas, maka pengujian model VAR akan dilakukan hanya pada data PDRB dan pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk klasifikasi fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum yang mempunyai hubungan timbal balik atau dua arah. Dari hasil pengujian dan data yang tersedia maka pengujian model VAR hanya dapat dilakukan dengan menggunakan lag = 1 dan lag = 2. Untuk pengujian lag = 3 tidak dapat dilakukan dalam pengujian ini karena sampel data yang terbatas. Dengan kondisi yang demikian maka perbandingan hasil pengujian model VAR antara lag = 1 dan lag = 2 terlihat bahwa output secara signifikan akan mempengaruhi saat menggunakan lag = 2.

Dan dari estimasi output yang dihasilkan terlihat bahwa semua variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk klasifikasi fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum.

Kemudian dilihat dari R^2 *adjusted* pada lag = 1 dengan nilai 0.858984 lebih baik dibanding pada lag = 2 yang mempunyai nilai 0.814722. Demikian juga nilai AIC dan SIC – nya, pada lag = 1 lebih baik dibanding pada lag = 2. Nilai AIC pada lag = 1 adalah 28.69746, sedangkan untuk lag = 2 dengan Nilai AIC sebesar 27.13563. Dan nilai SIC pada lag = 1 adalah 28.72772, sedangkan nilai SIC pada lag = 2 adalah sebesar 27.18528.

Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan PDRB yang timbal balik atau dua arah hanya pada Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal untuk klasifikasi fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dan signifikan pada lag = 1.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian mengenai pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal yang telah dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari proses pembentukan Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dengan metode langsung DOC disimpulkan bahwa terdapat realisasi dari Belanja Modal yang tidak/belum menjadi pembentuk Aset Tetap atau Modal Tetap sebesar 5% dari total realisasi Belanja Modal yang terdiri dari:
 - a. Kategori Kontruksi Dalam Pengerjaan yang artinya bahwa proses pengerjaan untuk dapat menjadi Aset Tetap atau Modal Tetap belum selesai sebesar 4,57%.
 - b. Realisasi Belanja Modal yang tidak menambah Aset Tetap atau Modal Tetap bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo karena langsung diserahkan/dihibahkan ke pada masyarakat sebesar 0, 15%
 - c. Realisasi Belanja Modal yang tidak menambah Aset Tetap atau Modal Tetap bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo karena dijadikan bentuk dana bergulir dan diberikan kepada masyarakat sebesar 0, 27%.

Realisasi Belanja Modal tersebut dilihat dari tujuan penelitian ini yaitu dampaknya terhadap Aset Tetap merupakan suatu penyimpangan hasil penelitian. Namun demikian jika dilihat dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk memberikan hibah serta peningkatan ekonomi kerakyatan melalui dana bergulir, hal ini tentu bukan merupakan sebuah permasalahan. Meskipun untuk melihat dampak dari kebijakan ini, harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Kondisi ini dapat menjadi masukan bagi peneliti lain jika akan melakukan penelitian tentang hal tersebut.

Sedangkan untuk kategori Kontruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan tujuan penelitian, realisasi Belanja Modal tersebut di atas secara teori dan

kebijakan akuntansi yang dianut oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum dapat dikategorikan dalam Aset Tetap karena proses pengerjaannya belum selesai. Aset Tetap ini juga belum dapat dimanfaatkan oleh untuk operasional maupun dinikmati masyarakat secara langsung. Sehingga sesuai dengan tujuan penelitian ini maka kategori ini merupakan penyimpangan dari realisasi Belanja Modal. Meskipun demikian pada akhirnya jika proses pengerjaan atau pembangunan serta proses administrasinya telah selesai maka kategori ini dapat menjadi penambah Aset Tetap dan bukan merupakan penyimpangan dari penelitian.

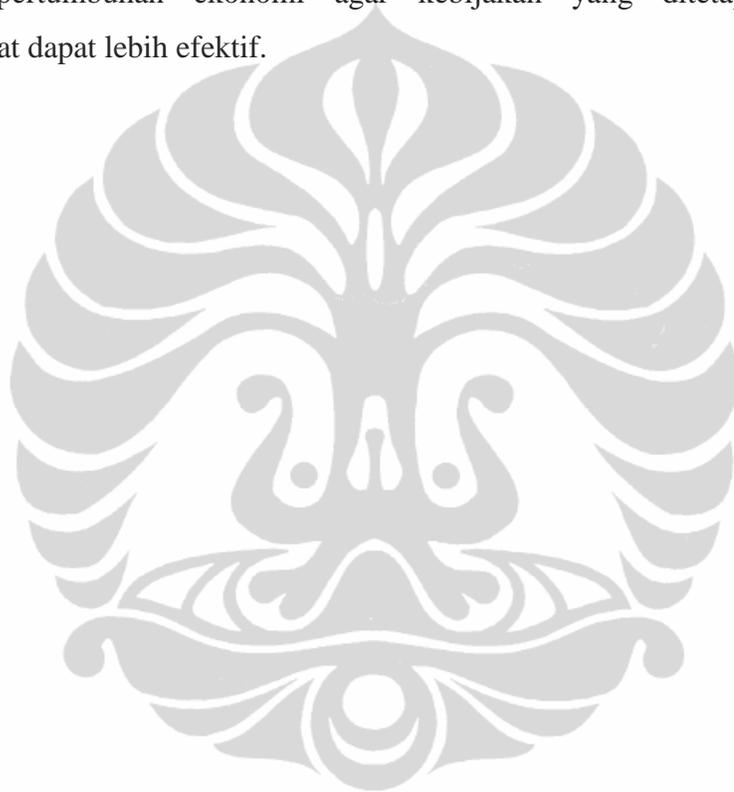
2. Hubungan kausalitas antara Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal dengan PDRB yang timbal balik atau dua arah hanya pada Aset Tetap atau Modal Tetap yang berasal dari Belanja Modal untuk klasifikasi fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dan signifikan pada lag = 1. Hal ini berarti bahwa Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum akan memberikan dampak timbal balik dengan PDRB pada tahun pertama setelah Aset Tetap tersebut diadakan dan setelah PDRB tersebut meningkat.

Implikasi dari penelitian ini terhadap kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo diantaranya adalah:

1. Adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa 5% dari realisasi Belanja Modal tidak menambah/belum menjadi pembentuk Aset Tetap maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Belanja Modal tersebut. Untuk realisasi yang belum menjadi penambah Aset Tetap atau Modal Tetap karena belum selesai agar dapat dipastikan bahwa belanja modal tersebut akan menambah aset tetap sesuai dengan kategorinya ketika proses pengerjaan dan administrasinya telah selesai. Untuk kategori realisasi yang dihibahkan atau menjadi dana bergulir agar kebijakan tersebut dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
2. Sedangkan untuk hasil penelitian yang menyatakan bahwa 95% realisasi Belanja Modal telah menjadi pembentuk Aset Tetap maka monitoring dan

evaluasi pemanfaatan sesuai dengan tujuannya perlu dilakukan oleh Pemerintah Gorontalo sehingga Aset Tetap yang telah terbentuk dapat menjadi aset produktif.

3. Selain itu, hasil peneliatian yang berjumlah 95% realisasi Belanja Modal telah menjadi pembentuk Aset Tetap maka perlu memperhatikan *trend* pengalokasian Belanja Modal yang terkait langsung dengan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi agar kebijakan yang ditetapkan untuk masyarakat dapat lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abustan dan Mahyuddin, 2009, *Analisis Vector Auto Regressive (VAR) Terhadap Korelasi Antara Belanja Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan, Tahun 1985 – 2005*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No. 1, Juni 2009, Makasar
- BAPPEDA, 2005, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005 - 2010*, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, 2005, Limboto
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia, 2007, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar, 26-28 Juli 2007, Magister Sains Ilmu-ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta
- Data-data dari Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP
- Data-data www.djpk.depkeu.go.id
- Data-data dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo
- Fuad, Noor dan Subkhan dan Insyafiah, 2006, *Government Finance Statistics beserta Ilustrasi Penerapannya di Indonesia* (GFS beserta Ilustrasi Penerapannya di Indonesia), Jakarta, BPPK
- Field, Andy. 2000. *Discovering Statistics Using SPSS for Windows Advanced Techniques for The Beginner*. London : SAGE Publications
- Hadi, Yonathan S, *Analisis Vector Auto Regression (Var) Terhadap Korelasi Antara Pendapatan Nasional Dan Investasi Pemerintah Di Indonesia, 1983/1984 – 1999/2000*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2
- IMF, *Manual Government Finance Statistics* (Manual GFS), International Monetary Fund (IMF), 2001
- Ronald E. Walpole, *Pengantar Statistika*, 1993, edisi ke-3, PT. Gramedia , Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____, Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- _____, Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Schmalwasser, Dr. Oda and Schidlowski, Michael, 2006, *Measuring Capital Stock in Germany*, The journal Wirtschaft und Statistik 11/2006
- Suminto, M.Sc, 2004, *Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara*, Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran, Depkeu), Departemen Keuangan
- Sundrum R.M. (1986) '*Indonesia's Rapid Economic Growth: 1968-81*', Bulletin of Indonesian Economic Studies
- Syaiful, SE., AK., MM, *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*
- Tim Pengembangan SIMDA, 2006, *Manual Sistem dan Prosedur: Perencanaan dan Penganggaran*, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP
- Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah, *SAKD Buku 3*, Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)
- Van de Eng, Pierre, 2008, *Capital Formation and Capital Stock in Indonesia, 1950 – 2007*, The Australian National University
- Wicaksono, Gunawan; Ariantoro, Eko; dan Sari, A. Reina, 2002, *Penghitungan Data Stok Kapital Dengan Metode Perpetual Inventory (PIM) (Suatu Upaya Penyediaan Data Stok Kapital Untuk Penghitungan Potensial Output Dengan Pendekatan Fungsi Produksi)*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 2002, Jakarta
- Wicaksono, Gunawan; dan Ariantoro, Eko, 2003, *Pengujian Validitas Data Stok Kapital Dan Perkembangan Stok Kapital Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Desember 2003, Jakarta

Lampiran 1

Data Akumulasi Aset Tetap Atau Modal Tetap Menurut Jenis Aset
Dengan Metode Langsung Doc (*Direct Observation Of Capital*)
Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2001 - 2010

Tahun	Jenis Aset Tetap/Modal Tetap							Total
	Tanah	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jembatan	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
2001	8,624,915,739	61,021,091,008	77,502,192,246	95,433,291,858	49,155,000	-	2,946,542,991	245,577,188,842
2002	9,791,997,239	67,578,594,472	80,715,343,116	108,535,585,858	49,155,000	-	10,669,640,466	277,340,316,151
2003	11,250,849,114	80,942,650,123	112,008,241,329	124,913,453,358	49,155,000	15,680,706,761	10,669,640,466	355,514,696,151
2004	15,126,216,869	110,107,483,021	151,387,180,613	136,224,821,963	49,155,000	-	-	412,894,857,466
2005	15,446,731,395	119,411,749,455	164,196,855,213	143,221,625,128	55,155,000	-	3,375,000,000	445,707,116,191
2006	88,706,046,350	67,959,762,746	294,397,944,781	587,386,382,697	1,934,687,119	-	15,847,000,000	1,056,231,823,693
2007	89,031,902,350	86,924,379,508	312,494,138,847	655,286,772,445	7,691,796,459	859,157,750	14,625,000,000	1,166,913,147,359
2008	87,958,442,350	102,027,864,231	296,655,448,192	662,959,662,304	14,321,740,821	-	36,425,417,835	1,200,348,575,733
2009	79,705,322,350	127,731,100,433	343,375,073,347	765,538,271,361	15,065,251,947	-	14,625,000,000	1,346,040,019,438
2010	79,792,522,350	150,667,355,550	364,139,935,484	801,309,475,201	16,223,441,947	-	18,675,572,721	1,430,808,303,253
Total	485,434,946,106	974,372,030,548	2,196,872,353,168	4,080,809,342,173	55,488,693,292	16,539,864,511	127,858,814,479	7,937,376,044,277

Lampiran 2

Data Akumulasi Aset Tetap Atau Modal Tetap Menurut Fungsi
Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2001 – 2010

Tahun	Pelayanan umum	Pertahanan *)	Ketertiban dan ketentraman	Ekonomi	Lingkungan hidup	Perumahan dan fasilitas umum	Kesehatan	Pariwisata dan budaya	Agama *) **)	Pendidikan	Perlindungan sosial	Total
2001	19,410	-	160	6,045	-	101,587	37,463	144	-	80,019	272	245,100
2002	26,011	-	160	6,950	-	124,626	38,003	1,054	-	80,019	517	277,340
2003	36,335	-	160	8,550	-	160,785	59,526	2,533	-	86,712	914	355,515
2004	42,830	-	293	34,882	-	208,956	44,740	2,639	80,344	1,585	-	416,269
2005	44,906	-	300	38,848	-	227,852	47,740	3,903	-	80,520	1,639	445,708
2006	157,757	-	1,241	24,413	-	617,556	47,381	23,026	-	183,300	1,558	1,056,232
2007	171,354	-	1,320	30,193	-	676,713	61,217	23,182	-	201,041	1,892	1,166,912
2008	171,282	-	1,467	34,313	941	701,390	71,590	23,788	-	192,516	3,059	1,200,346
2009	172,958	-	1,553	45,647	2,188	779,608	88,538	23,258	-	227,930	4,360	1,346,040
2010	175,526	-	1,553	79,295	2,938	816,291	105,269	-	-	244,671	5,264	1,430,807
Total	1,018,369	-	8,207	309,136	6,067	4,415,364	601,467	103,527	80,344	1,378,313	19,475	

Hasil Pengujian Unit Root

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Date: 02/04/12 Time: 22:57

Sample: 2001 2010

Series: PDRB, PFU, PS, PU, AG, EK, KES, LH, PB, PDK, TT

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic selection of lags based on AIC: 0 to 1

Total number of observations: 95

Cross-sections included: 11

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	40.1811	0.0103
ADF - Choi Z-stat	-1.21533	0.1121

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Intermediate ADF test results UNTITLED

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
PDRB	0.9514	0	1	9
PFU	0.4104	0	1	9
PS	0.9810	1	1	8
PU	0.1886	1	1	8
AG	0.0001	0	1	9
EK	0.2695	0	1	9
KES	0.0638	1	1	8
LH	0.1781	0	1	9
PB	0.8346	1	1	8
PDK	0.4802	0	1	9
TT	0.2123	0	1	9

Hasil Pengujian Kausalitas Granger

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 02/05/12 Time: 00:36

Sample: 2001 2010

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
AG does not Granger Cause PDRB	8	0.28131	0.77273
PDRB does not Granger Cause AG		NA	NA
EK does not Granger Cause PDRB	8	0.30140	0.75984
PDRB does not Granger Cause EK		32.6958	0.00919
KES does not Granger Cause PDRB	8	0.65202	0.58192
PDRB does not Granger Cause KES		1.64424	0.32951
LH does not Granger Cause PDRB	8	0.37897	0.71328
PDRB does not Granger Cause LH		2.33061	0.24504
PB does not Granger Cause PDRB	8	10.1946	0.04594
PDRB does not Granger Cause PB		0.63749	0.58787
PDK does not Granger Cause PDRB	8	0.81214	0.52254
PDRB does not Granger Cause PDK		7.37879	0.06944
PFU does not Granger Cause PDRB	8	1.29225	0.39374
PDRB does not Granger Cause PFU		2.66330	0.21626
PS does not Granger Cause PDRB	8	0.20941	0.82199
PDRB does not Granger Cause PS		17.0491	0.02300
PU does not Granger Cause PDRB	8	0.35901	0.72479
PDRB does not Granger Cause PU		2.09010	0.27007
TT does not Granger Cause PDRB	8	0.04355	0.95798
PDRB does not Granger Cause TT		4.66593	0.11999

Hasil Pengujian Var Dengan Lag = 1

Vector Autoregression Estimates

Date: 02/05/12 Time: 01:52

Sample (adjusted): 2002 2010

Included observations: 9 after adjustments

Standard errors in () & t-statistics in []

	PDRB	PFU
PDRB(-1)	1.390645 (0.34197) [4.06661]	0.165936 (0.04762) [3.48467]
PFU(-1)	-3.910166 (3.30735) [-1.18227]	-0.980916 (0.46055) [-2.12989]
C	-106163.5 (217450.) [-0.48822]	-74161.63 (30279.9) [-2.44920]
R-squared	0.894238	0.748670
Adj. R-squared	0.858984	0.664893
Sum sq. resids	1.29E+11	2.50E+09
S.E. equation	146532.8	20404.70
F-statistic	25.36548	8.936495
Log likelihood	-118.0009	-100.2575
Akaike AIC	26.88909	22.94612
Schwarz SC	26.95483	23.01186
Mean dependent	1040255.	43151.09
S.D. dependent	390211.3	35248.33
Determinant resid covariance (dof adj.)		7.80E+18
Determinant resid covariance		3.47E+18
Log likelihood		-217.6425
Akaike information criterion		49.69834
Schwarz criterion		49.82983

Lampiran 6

Hasil Pengujian Var Lag = 2

Vector Autoregression Estimates

Date: 02/05/12 Time: 01:27

Sample (adjusted): 2003 2010

Included observations: 8 after adjustments

Standard errors in () & t-statistics in []

	PDRB	PFU
PDRB(-1)	0.990065 (0.56961) [1.73816]	0.125987 (0.09449) [1.33333]
PDRB(-2)	1.051674 (0.91213) [1.15298]	0.076971 (0.15131) [0.50869]
PFU(-1)	-4.673789 (3.79790) [-1.23062]	-1.042882 (0.63003) [-1.65530]
PFU(-2)	-7.997978 (6.60631) [-1.21066]	-0.333111 (1.09591) [-0.30396]
C	-356405.1 (349028.) [-1.02114]	-89311.90 (57899.6) [-1.54253]
R-squared	0.920595	0.751126
Adj. R-squared	0.814722	0.419293
Sum sq. resids	8.18E+10	2.25E+09
S.E. equation	165097.3	27387.65
F-statistic	8.695247	2.263568
Log likelihood	-103.5425	-89.17097
Akaike AIC	27.13563	23.54274
Schwarz SC	27.18528	23.59239
Mean dependent	1091398.	46682.40
S.D. dependent	383554.9	35939.85
Determinant resid covariance (dof adj.)		1.87E+19
Determinant resid covariance		2.62E+18
Log likelihood		-192.3465
Akaike information criterion		50.58661
Schwarz criterion		50.68592